

PEMETAAN POTENSI SOSIAL-KEAGAMAAN MADURA

MENUJU DISTINGSI RISET
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI IAIN MADURA



Tim Pemetaan Riset dan Pengabdian Masyarakat
LP2M IAIN Madura 2021-2022

PEMETAAN POTENSI SOSIAL-KEAGAMAAN MADURA

MENUJU DISTINGSI RISET
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI IAIN MADURA

**Tim Pemetaan Riset dan Pengabdian ` Masyarakat
LP2M IAIN Madura 2021-2022**



PEMETAAN POTENSI SOSIAL-KEAGAMAAN MADURA
Menuju Distingsi Riset dan Pengabdian Masyarakat di IAIN Madura

©Tim Pemetaan Riset dan Pengabdian Masyarakat
LP2M IAIN Madura 2021-2022

Desain Sampul : Hamid Muhammad
Penata Isi : Kholil Ahmad
Editor : Masyithah Mardhatillah

Diterbitkan oleh :
LP2M IAIN Madura
Gd. Rektorat Lt. 3 IAIN Madura
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan
Email : lp2m@iainmadura.ac.id

Berkerjasama dengan:
iainmadura press
Gd. Perpustakaan Lt. 4 IAIN Madura
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan
Email: iainmadurapress@gmail.com

xii+91 hlm; 15 x 21 cm
Cetakan Pertama, Maret 2022

ISBN 978-623-5614-06-9

Indonesian Library Cataloguing in Publication Data
A catalogue record for this book is available from the Perpunas RI

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotocopy, mikrofilm, VCD, CD-Rom, dan rekaman suara) tanpa izin dari penerbit.

TIM PEMETAAN RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- Penanggung Jawab** Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
- Tim Penulis**
- Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Phil.I
 - Dr. Ainurrahman Hidayat, M.Hum
 - Dr. H. Norhasan, M.Ag
 - Dr. H. Moh Zahid, M.Ag
 - Dr. Ah. Fawaid, M.A
 - Moch Cholid Wardi, M.H.I
 - Dr. Zaglul Fitriani, M.A
 - Syukron Affani, M.Si
 - Masyithah Mardhatillah, M.Hum
 - Taufikurrahman, M.H
 - Dr. Mohammad Subhan Zamzami, M.Th.I
- Tim Teknis**
- Faraniena Yunaeni Risdiana, M.Si
 - Mohammad Erliyanto, S.Sos
 - Akhmad Fakhurraji, SE
 - Syamsul Arifin, S.Kom

KATA PENGANTAR

PEMETAAN RISET PERGURUAN TINGGI:

Mencermati Lokalitas sebagai Basis Penyusunan Agenda Riset

Prof. Dr. Nur Syam, MSi

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Saya tentu berterima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Madura yang telah meminta saya terlibat dalam acara penyusunan agenda riset perguruan tinggi yang dilakukan beberapa saat yang lalu. Di antara tujuan penyusunan agenda riset ini adalah untuk menemukan distingsi dan ekseleksi dalam kerangka penyelenggaraan riset pada PTKIN agar terdapat sasaran dan medan atau ruang yang berbeda dengan PTKIN lain. Dua hal tersebut berfungsi sebagai pembeda di tengah keinginan untuk menjadikan riset sebagai fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya *Islamic studies*, ilmu sosial, humaniora serta sains dan teknologi.

Perguruan tinggi di Indonesia memang memiliki kekhasan yang disebut sebagai tridarma perguruan tinggi. Kekhasan ini tentu harus disambut dengan gegap gempita sebagaimana yang tercantum dan terkait dalam konteks Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang sekarang sedang diupayakan realisasinya oleh semua perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Di dalam rumusan ini, dikenal konsep konvergensi tridarma perguruan tinggi melalui sistematisasi

pengajaran/pendidikan dengan riset dan pengabdian masyarakat. Sebuah materi awalnya diajarkan, diteliti lalu diabdikan untuk masyarakat atau diteliti lebih dahulu, diabdikan dan diajarkan, dan demikian seterusnya. Tentu saja, hal ini harus disesuaikan dengan MBKM yang juga memiliki visi untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan *hard skilled*, tetapi juga *soft skilled* berupa pengalaman kepada mahasiswa agar mereka siap hidup di masyarakat. Mahasiswa dibekali keterampilan tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk hidup di tengah masyarakat mengingat bekerja adalah tujuan instrumental, sementara bekerja dan hidup di masyarakat adalah *final goal* yang demikian penting.

Secara kelembagaan, UIN dan IAIN memiliki tugas mengembangkan integrasi ilmu dengan mendialogkan atau mengintegrasikan bidang ilmu sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan (ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, sains dan teknologi, ilmu formal dan ilmu terapan). Tujuannya adalah agar di masa depan, pengembangan ilmu pengetahuan berbasis pendekatan atau *approach* dapat semakin kuat. Seirama dengan visi ini, PTKIN berkewajiban melakukan kajian-kajian dalam corak integrasi baik yang sifatnya interdisipliner, *cross*-disipliner, multidisipliner atau transdisipliner. Di dalam kerangka untuk membangun distingsi dan ekselensi tersebutlah, para dosen wajib melakukan riset yang relevan.

Pemetaan riset dalam hal ini tentu sangat penting. Pada era Presiden SBY, kita dapati Dewan Riset Nasional (DRN) dan juga Dewan Riset Daerah (DRD) dengan salah satu tugas dan fungsinya untuk merumuskan riset pengembangan dan pembangunan baik yang berskala nasional maupun daerah. Melalui pemetaan ini, visi dan misi pembangunan bangsa, baik dalam aras nasional maupun aras lokal, akan bisa diserasikan. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan antara visi dan misi pembangunan dengan riset

yang diselenggarakan para peneliti dan bahkan para pemerhati pembangunan.

Bagi saya, keberadaan agenda riset IAIN Madura sebagaimana yang sudah dirumuskan tidaklah terlalu jauh dengan maksud dan tujuan agar arah riset dapat mendukung visi dan misi IAIN Madura. Visi ini juga terkait dengan agenda untuk menjadi perguruan tinggi yang memiliki distingsi dan ekselensi di dalam pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat pada level tertentu dan dalam kurun waktu yang dimungkinkan ketercapaiannya. Untuk mendukung distingsi dan ekselensi ini, diperlukan arah yang jelas dengan tahapan-tahapan yang tegas agar ketercapaian visi dapat direalisasikan.

Madura dari sisi geografis tentu menarik untuk dicermati. Gugusan tanah yang kering dengan dikelilingi laut menghadirkan budaya yang khas Madura dan juga etos kerja yang bertalenta sekaligus berbeda dengan masyarakat lainnya. Karena tanahnya yang tandus, masyarakat Madura dipercaya memiliki etos kerja yang tinggi seperti tampak dalam kebiasaan merantau untuk bekerja dalam segmen masyarakat apa saja. Ketiadaan rasa “malu” untuk bekerja apa saja tersebut menarik untuk dijadikan inspirasi bagi kaum akademisi dan intelektual dalam bekerja keras demi mencapai tujuan individual, komunitas, masyarakat, dan institusi.

Madura juga terdiri dari wilayah kepulauan dengan tradisi dan kehidupan yang unik. Sebagai masyarakat bahari, tantangan kehidupan yang dihadapi juga sangat besar. Ia tidak melulu berkait dengan faktor alam, tetapi juga lambatnya perubahan sosial. Jiwa kaum bahari adalah jiwa merdeka yang tidak terikat oleh kewilayahan. Semuanya berkait kelindan dengan falsafah hidup, religiositas, lingkungan, relasi sosial, relasi dengan alam, dan pengembangan ekonomi, budaya bahkan politik. Semuanya tersaji

dengan indah bagi yang mau dan serius melakukan kajian dan penelitian terhadapnya.

Kajian tentang Madura dalam ragam penelitian tentu penting. Saya mencoba membaginya dalam dua kategori, yaitu kajian teks dan teks sosial atau kajian teks dan kajian realitas empiris serta realitas simbolis. Kajian teks diperlukan dalam rangka menghadirkan kajian-kajian yang bertujuan melestarikan teks-teks hasil penafsiran para ulama Madura yang jumlahnya tentu sangat banyak. Untuk segmen ini, diperlukan kerja sama dengan beberapa universitas di Belanda atau institusi pemerintahan setempat dalam rangka mengakses koleksi perpustakaan. Hasil pembacaan dari *cluster* ini akan bisa menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan falsafat hidup masyarakat Madura di masa lalu sembari menemukan relevansinya dengan kehidupan sosial di masa sekarang.

Sementara itu, kajian atas realitas empiris dan simbolis akan sangat penting dalam melihat Madura sekarang dan masa depan. Tidak ada yang stagnan di dalam kehidupan ini karena semua akan mengalami perubahan. Kajian atas realitas empiris dan simbolis akan mengungkap bagaimana kehidupan keagamaan, sosial, ekonomi, budaya dan politik saling terkait satu dengan lainnya. Tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta lain yang menjadi penyebabnya sebagaimana ancangan di dalam penelitian kuantitatif. Senada dengan itu, setiap fenomena memiliki makna sebagaimana ancangan dalam penelitian kualitatif. Melalui variasi desain penelitian ini, akan didapatkan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif sehingga lahirlah teori atau konsep yang relevan dengan pengembangan konvergensi tridharma perguruan tinggi.

Para dosen IAIN Madura yang kebanyakan masih berusia muda dan memiliki kualitas pendidikan yang baik saya kira bisa diajak berlari

untuk mengejar perubahan atau bahkan mengakselerasi perubahan. Semua ditujukan agar IAIN Madura memiliki distingsi dan ekselensi dalam agenda mewujudkan transformasi menuju UIN Madura di masa depan. Kita semua berharap agar dalam proses tersebut, para civitas akademika dapat mendukung dan mengawalinya dengan sepenuh hati termasuk melakukan riset sebagai agenda yang sudah dirumuskan bersama.

The only permanent of science is research. Melalui riset yang distingtif dan ekselen, akan didapatkan inspirasi dan sumber-sumber belajar yang dapat dikonvergensiikan dan menjadi basis bagi pemenuhan kebutuhan MBKM yang sekarang sedang digalakkan.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Jenis dan Topik Penelitian	9
BAB III Sasaran	13
BAB IV Peta Riset dan Pengabdian Masyarakat di Madura	19
BAB V Penutup	79
Biodata Tim Riset	81

BAB I **Pendahuluan**

A. Latar Belakang

ETNIS MADURA dikenal sebagai etnis ketiga terbesar di Indonesia setelah etnis Jawa dan Bali. Ekologi tegal yang ditandai dengan kondisi alam yang tandus, berkapur, dan berbatu-batu membuat masyarakat Madura dikenal sebagai petani yang ulet dan pekerja keras. Akan tetapi, rendahnya keterampilan dan pendidikan yang merupakan tipikal masyarakat petani subsisten pada umumnya di Indonesia mengakibatkan rendahnya produktivitas dan lemahnya mekanisme pasar.

Ekologi tegal juga mempengaruhi pola pemukiman. Tidak seperti di Jawa dengan model desa terpusat (*nuclear village*) yang dikelilingi sawah, desa di Madura umumnya terserak-

serak (*scattered village*) dalam satuan-satuan kecil (*kampong*). Masyarakat cenderung membangun hunian dalam satu pekarangan yang terdiri dari empat atau lima rumah milik penghuni yang satu sama lain masih terikat dalam hubungan saudara. Pekarangan tersebut biasanya juga dikelilingi oleh pagar tembok atau pagar hijau yang disebut *kampong meji*. Beberapa *kampong meji* kemudian membentuk desa kecil dan beberapa desa kecil inilah yang kemudian membentuk desa. Dengan demikian, di Madura, satuan teritorial yang disebut desa adalah kumpulan dari desa-desa kecil yang masing-masing terdiri dari *kampong meji*. Di luar *kampong meji*-lah, orang Madura membangun tegal dan membuat galengan untuk menahan air di musim hujan.

Pola pemukiman ini mau tak mau berpengaruh terhadap organisasi sosial. Sebagai orang Islam taat, di setiap *kampong meji* nyaris selalu didapatkan surau yang biasa dipakai oleh semua penghuni atau tamu. Sementara itu, masjid biasanya hanya ada di satuan teritorial desa. Ketika pada gilirannya pola pemukiman mempengaruhi organisasi sosial, keberadaan masjid desa menjadi sangat penting. Dalam konteks yang sama, kepala masjid dan kyai desa berada di puncak hirarki sosial pedesaan. Kyai desa yang mempunyai akar ke bawah (masyarakat) bahkan dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding seorang kepala desa (*klebun*) yang cenderung berhubungan ke atas (pemerintah kecamatan, kabupaten, dan seterusnya).

Di sisi lain, ekologi tegal tidak dapat mencukupi kebutuhan makan penduduknya. Padahal, pertumbuhan penduduk di Madura lebih tinggi dibanding angka rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa-Madura. Oleh karena itu, migrasi penduduk ke luar pulau Madura merupakan gejala permanen dan bukan gejala musiman.

Data-data penyeberangan dari Madura ke Jawa menunjukkan gejala migrasi tersebut. Pada 1930, orang Madura yang ada di rantau berjumlah dua kali lipat lebih banyak dibanding yang tinggal di pulau itu sendiri. Sebagian besar mereka menetap di daerah ujung Jawa Timur.

* * *

Dalam konteks yang lebih luas, di beberapa negara, agama menjadi faktor yang dominan bagi tumbuhnya *civil society* di mana agama mempunyai kontribusi besar bagi lahirnya kesadaran masyarakat terhadap batas-batas kekuasaan negara. Sebagai contoh, gerakan kerakyatan di Amerika Latin berhasil karena diilhami oleh teologi pembebasan sementara keberhasilan aksi rakyat Polandia banyak disokong oleh dukungan Gereja Katolik dan Kepausan Vatikan. Begitu pula, keberhasilan rakyat Filipina menumbangkan rezim Marcos yang otoriter juga dimotori pihak gereja pimpinan Kardinal Jaime Sin, seperti halnya keberhasilan revolusi Iran yang dipelopori Imam Khomeini.

Terkait ini, Moeslim Abdurrahman menegaskan bahwa inti pemberdayaan *civil society* tercermin pada adanya *public sphere discourse* yang bersifat otonom. Hal tersebut ditandai dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan problem-problem sosial yang mereka hadapi tanpa intervensi otoritas politik yang cenderung mengungkung.

Dalam persepsi orang Madura kebanyakan, praktik ajaran keagamaan yang menyimpang dianggap melukai perasaan dan harga diri. Individu atau komunitas yang demikian akan dianggap sebagai orang cengkal (keras kepala) sehingga harus diberi peringatan mulai dari yang sifatnya lunak sampai yang keras. Hal ini erat

kaitannya dengan masyarakat Madura yang di samping merupakan masyarakat tegalan, juga merupakan masyarakat bahari dengan fenomena sosial budaya yang sangat kompleks. Kompleksitas budaya bahari dicirikan oleh sedikitnya lima fenomena sebagai berikut.

Pertama, kelompok-kelompok sosial kebaharian seringkali bukan sekadar merupakan kelompok-kelompok kerja yang merupakan sub-sub komunitas desa. Lebih jauh, mereka bisa dikategorikan sebagai sub-sub etnis seperti ditunjukkan oleh adanya desa-desa nelayan Bugis, Mandar, Makassar, dan Madura di kawasan pesisir.

Kedua, munculnya berbagai kategori sosial di wilayah tersebut dikondisikan oleh perkembangan jenis-jenis usaha ekonomi yang terkait dengan laut, misalnya perikanan, pelayaran atau usaha transportasi laut, pertambangan, pariwisata bahari, dan jasa pengamanan wilayah laut dan isinya.

Ketiga, selain pelaku dan pengguna langsung, terdapat kategori-kategori sosial lain yang turut terlibat dalam setiap sektor ekonomi kebaharian. Sektor ini tidak hanya melibatkan kelompok nelayan, tetapi juga para pembuat perahu dan alat tangkap, pedagang, pengusaha dan rentenir, koperasi dan bank, pasar dan tempat pelelangan ikan, instansi pemerintah yang terkait, petugas keamanan laut, peneliti dan praktisi, lembaga penyandang dana, dan organisasi non-pemerintah.

Keempat, fenomena sosial budaya bahari tidak hanya tampak pada aspek-aspek budaya, tetapi diperlihatkan pula oleh kategori dan hirarki sosial penduduk dari lingkungan yang berbeda. Fenomena budaya dari setiap kategori sosial mempunyai karakter

kepribadian kebaharian masing-masing. Budaya bahari kelompok nelayan, misalnya, akan menunjukkan karakter yang berbeda dari kelompok awak.

Kelima, kompleksitas fenomena kebaharian juga berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya bahari itu sendiri, baik akibat perkembangan yang bertumpu pada faktor-faktor internal maupun perkembangan yang didorong oleh kekuatan eksternal.

* * *

Kaitannya dengan fenomena sosial keagamaan di Madura, rumpun keilmuan fakultas di IAIN Madura senantiasa diupayakan untuk bisa *compatible* sebagai perspektif dalam melihat berbagai gejala tersebut. Rumpun keilmuan tersebut juga disinergikan dengan ke-Madura-an sebagai lokus sosial keagamaan Madura. Sinergi yang demikian akan menjadi distingsi yang menarik menuju IAIN Madura Unggul dan UIN Madura ke depan.

Bidang riset keagamaan Madura sebagai distingsi IAIN Madura menjadi penting untuk dipetakan melalui sebuah riset *group* sebagai sebuah kebijakan penelitian yang berbasis kebutuhan dan kepentingan lembaga ke depan. Dalam waktu lima tahun ke depan, agenda riset sosial-keagamaan Madura akan mewujudkan menjadi topik penelitian yang *branded* bagi IAIN Madura dan *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Jenis penelitian dimaksud diorientasikan pada jenis *verstehen* dan penelitian yang berbasis perubahan.

Jenis pertama berbasis pada pemahaman yang memungkinkan seseorang bisa mengerti apa yang diyakini orang lain tanpa prasangka tertentu. Ia bertujuan untuk memahami makna yang mendasari suatu peristiwa sosial. Proses memahami realitas sosial

dalam konteks ini diartikan dengan upaya menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan tertentu. Hasil dari penelitian ini bukanlah berupa angka-angka hasil pengukuran, tetapi berupa informasi.

Sementara itu, jenis penelitian kedua merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas arus bawah. Semangatnya adalah untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melalui pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan menuju kondisi hidup yang lebih baik. Dengan demikian, sesuai istilahnya, jenis penelitian ini memiliki tiga pilar utama, yakni **metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi**. Implikasinya adalah bahwa penelitian jenis ini dalam praktiknya dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, bertujuan mendorong aksi transformatif dan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat atau anggota komunitas sebagai pelaksananya.

Seperti halnya penelitian, bidang pengabdian masyarakat sosial keagamaan Madura sebagai distingsi IAIN Madura juga penting dipetakan agar benar-benar berbasis kebutuhan dan kepentingan IAIN Madura ke depan. Dalam waktu lima tahun ke depan, agenda pengabdian masyarakat Sosial-Keagamaan Madura akan mewujudkan menjadi topik pengabdian masyarakat yang *branded* bagi IAIN Madura dan *stakeholder* yang terlibat di dalamnya.

Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat diorientasikan pada model partisipatoris. Pendekatan ini dalam prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, produksi pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis

secara kolektif atas adanya belenggu ideologi globalisasi neo-liberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan.

Untuk itu, LP2M membentuk tim khusus untuk melakukan riset group ke tiga wilayah di Madura, yaitu Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Kabupaten Bangkalan belum dijadikan sebagai wilayah riset karena keterbatasan waktu dan dana serta diproyeksikan untuk menjadi prioritas riset pada tahun mendatang bersama wilayah kepulauan di Sumenep.

B. Tujuan

Tujuan dari pemetaan tema riset dan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut;

1. *Al-muḥāfazatu a'lā al-qodīm al-ṣāliḥ wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlah (*)*
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di IAIN Madura
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Madura

Jenis dan Topik Penelitian

BAB II

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian *verstehen*
2. Jenis penelitian tindakan yang berorientasi pada perubahan

B. Topik Penelitian

1. Kebijakan Publik

- a) Policy studies* tentang berbagai perundang-undangan, PP dan PERDA tentang persoalan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan keagamaan Madura

2. Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata

- a) Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan
- b) Tembakau dan kesejahteraan petani Madura
- c) Garam dan kesejahteraan petani Madura
- d) Pengembangan dan peningkatan produk pertanian (holtikultur), peternakan, perikanan Madura
- e) Penguatan profesi dan *skill* tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan, petani)
- f) Kemiskinan di Madura
- g) Lingkungan hidup (pantai, pegunungan)
- h) IPTEK dan inovasi berbasis SDA lokal Madura
- i) Manajemen sampah pada lembaga dan masyarakat
- j) Pengembangan potensi wisata Madura
- k) Tambak dan alih fungsi lahan

3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura

- a) Resolusi konflik masyarakat Madura
- b) Pengembangan kualitas kepemimpinan desa
- c) Ketahanan komunitas
- d) Perubahan peran publik perempuan Madura (P4M)
- e) Problem narkoba dan kenakalan remaja
- f) Problem pernikahan dini dan anak jalanan
- g) Perawatan dan pengembangan Bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, ilmu dan keagamaan
- h) Tengka; dasar dan nilai prinsip bermasyarakat (etika Madura)

- i) Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura daratan dan kepulauan
- j) Model interaksi dan toleransi masyarakat Madura dengan masyarakat pendatang

4. Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura

- a) Sejarah Keislaman Madura
- b) Model dan pola dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat)
- c) Lembaga tradisional keagamaan Madura (*langghar*, pesantren salaf, madin)
- d) Pengembangan kualitas kepemimpinan pesantren
- e) Korporasi pesantren
- f) Revisiting peran, makna, dan posisi santri (*religious, scientific explorer, entrepreneur*)
- g) Pemaknaan mitologi dan cerita rakyat Madura
- h) Naskah kuno pesantren dan keraton

5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran

- a) Persoalan *single parent* keluarga pekerja migran
- b) Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura perantauan
- c) Model toleransi masyarakat Madura perantauan
- d) Legalitas Tenaga Migran

6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura

- a) Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan
- b) Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, *Halal Study Centre*, pusat studi ziswak.
- c) Model dan desain integrasi keilmuan.

BAB III Sasaran

PETA RISET dan pengabdian masyarakat menasar beberapa kelompok berikut ini;

A. Komunitas profesi

Komunitas profesi yang dimaksud terdiri dari profesi tradisional yang dijalani masyarakat dalam hidup kesehariannya seperti tukang ukir, pandai besi, nelayan, petani dan sebagainya. Kelompok profesi ini merupakan hasil pendalaman Tim Riset Group LP2M sebagai salah satu sasaran dalam peta riset dan pengabdian masyarakat demi *networking* yang saling menguntungkan di masa mendatang. Komunitas profesi merupakan mitra kerja yang sangat penting bagi agenda revitalisasi profesi-profesi tersebut di masa mendatang melalui penambahan *value* terhadap hasil */output*

pekerjaan mereka seperti kenaikan harga, fasilitasi pemasaran yang lebih luas, apresiasi nyata dan aksi *networking* lainnya yang sangat mungkin dilakukan di masa-masa yang akan datang.

B. Lembaga keagamaan tradisional Madura

Lembaga keagamaan tradisional dalam konteks peta riset dan pengabdian masyarakat ini adalah *langghar* yang biasa ditemui di hampir setiap *taneyan lanjhang* dan berfungsi sebagai tempat mengajar mengaji Al-Qur'an serta praktik ibadah dasar bagi anak-anak usia sekolah. Keberadaan *langghar* ini disokong sedikitnya oleh pemilik (bangunan) *langghar*, tenaga pengajar, peserta didik/siswa, dan wali siswa. Selain *langghar*, terdapat juga lembaga-lembaga keagamaan tradisional semacam sekolah diniyah dan atau Madrasah Ibtida'iyah yang dilaksanakan secara tradisional tanpa mengikuti kurikulum resmi dari pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut adalah mitra kerja yang penting tidak hanya karena jumlahnya yang besar dan tersebar, tetapi karena perannya yang signifikan serta berdampak besar.

C. Pesantren

Pesantren menjadi semacam sekolah lanjutan dari *langghar* maupun Madrasah Diniyah/Ibtidaiyyah sebagai lembaga yang masih menjadi preferensi masyarakat Madura. Selain kiai dan nyai sebagai pemilik sekaligus pengasuh, pesantren juga memiliki banyak aktor lain mulai dari tenaga pendidik, rekanan, santri dan atau siswa, pengurus, wali santri hingga masyarakat setempat. Dalam peta riset dan pengabdian masyarakat, pesantren tidak hanya termasuk dalam kluster besar kepesantrenan, tradisi dan religiusitas masyarakat yang di antaranya membidik korporasi

pesantren, naskah kuno pesantren, dan semangat kewirausahaan, tetapi juga perihal manajemen sampah mengingat banyaknya volume sampah yang dihasilkan lembaga pendidikan sekaligus pengasramaan tersebut.

D. Pekerja dan keluarga migran

Pekerja migran ke luar negeri maupun ke luar daerah merupakan salah satu ikon klasik masyarakat Madura. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan permasalahan SDA sekaligus SDM yang belum tertangani dengan baik, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan bahkan perlindungan hukum. Selain para pekerja migran yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah, kelompok yang terdampak dari fenomena ini adalah keluarga para pekerja, utamanya anak dan atau pasangan para tenaga kerja tersebut. Sebab itu, pekerja maupun keluarga pekerja migran adalah mitra kerja penting dalam peta riset dan pengabdian masyarakat karena kompleksitas persoalan yang dihadapi mengharuskan penguraian benang kusut dari berbagai perspektif.

E. Kelompok rentan dan berkebutuhan khusus

Menurut Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada 26 jenis kelompok rentan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Namun begitu, kategori ini terdiri dari anak jalanan dan pelaku pernikahan dini. Dua kelompok tersebut sementara ini dianggap permasalahan khusus yang mengharuskan adanya campur tangan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui agenda riset dan pengabdian masyarakatnya. Persoalan anak jalanan, misalnya, bersangkutan erat dengan berbagai elemen di luar anak jalanan itu sendiri, mulai dari orang tua (kandung

maupun asuh), jaringan perdagangan anak, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, KPAI, dan lain sebagainya. Sementara itu, pernikahan dini juga mengharuskan keterlibatan banyak pihak tidak hanya keluarga dan masyarakat serta KPAI, misalnya, tetapi juga pendidik di lembaga formal maupun non-formal, utamanya dalam konteks Madura yang masih sangat memperhitungkan pertimbangan kiai kampung/guru dalam hal-hal terkait *tengka*, termasuk pernikahan. Dua hal ini dianggap layak sebagai sasaran dalam agenda riset dan pengabdian masyarakat karena sifatnya yang mendesak serta dampaknya yang menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

F. Bumdes, Koperasi, dan UMKM

Bumdes, Koperasi dan UMKM adalah mitra kerja ideal untuk berbagai agenda riset dan pengabdian masyarakat utamanya seputar perekonomian. Tiga lembaga ini sedikitnya dapat memberi gambaran *real* perihal kehidupan ekonomi masyarakat dari perspektif yang lebih dekat. Dari situ, persoalan, tantangan, kemajuan, pun hambatan yang dihadapi dan atau dialami masyarakat dapat diketahui sehingga agenda riset maupun pengabdian masyarakat dalam aspek ekonomi dapat lebih tepat sasaran.

G. Komunitas kesenian tradisional Madura

Komunitas kesenian tradisional merupakan salah satu ujung tombak perkembangan pariwisata di Madura. Itulah yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan komunitas satu ini di antara sasaran peta riset dan pengabdian masyarakat di Madura. Peran krusial dan distingtif yang diemban komunitas-komunitas tersebut sayangnya tampak belum banyak disadari baik oleh pemerintah

maupun masyarakat secara luas sehingga kendati ragam kesenian dengan sentuhan kontemporer semakin eksis, beberapa kesenian tradisional mulai pudar eksistensinya. Golongan ini sedikitnya terdiri dari pelaku kesenian, penikmat, produser, ahli atau pemerhati, serta masyarakat luas.

H. Korporasi dan *entrepreneur*

Para pemilik badan usaha dan wirausahawan adalah mitra kerja strategis dalam agenda riset maupun pengabdian masyarakat bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaku bisnis di lapangan, kelompok ini seringkali memiliki data yang tidak ter-cover di angka atau laporan formal sehingga layak dijadikan mitra kerja sekaligus informan untuk memastikan agenda riset dan pengabdian masyarakat dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebagai mitra, dinamika kerja dengan kelompok ini menghasilkan pola simbiosis mutualisme yang menguntungkan dua belah pihak sesuai porsinya masing-masing.

I. Lembaga pemerintah dan non-pemerintah

Lembaga pemerintah dan non-pemerintah hampir tak bisa dipisahkan dari apapun tema riset dan pengabdian masyarakat. Keduanya memegang peran sentral sebagai mitra kerja dalam menyediakan informasi yang relevan hingga menentukan arah kebijakan. Jika lembaga pemerintah terdiri dari unsur pemerintah terkecil hingga terbesar, maka lembaga non-pemerintah meliputi LSM, organisasi massa, komunitas, paguyuban, dan lain sebagainya.

J. Pemimpin formal dan non formal

Setali tiga uang dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemimpin formal maupun pemimpin lembaga non-formal merupakan *front-man* yang tidak boleh tidak digandeng dalam agenda riset maupun pengabdian masyarakat. Pemimpin formal sangat potensial dilibatkan untuk agenda-agenda kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak mulai dari aspek pendanaan, akses data, hingga perumusan kebijakan. Sementara itu, pemimpin non-formal dapat secara teknis membantu proses pengumpulan data, menghubungkan dengan informan yang relevan, menyajikan data untuk mengimbangi data-data formal, hingga mengawal pelaksanaan kebijakan yang dicanangkan.

Peta Riset dan Pengabdian Masyarakat di Madura

BAB IV

A. Kabupaten Sampang

SECARA KESELURUHAN, Kabupaten Sampang mempunyai wilayah teritorial seluas 1.233,30 km² pada 113008'–113039' Bujur Timur dan 06005'– 07013' Lintang Selatan dengan proporsi luasan 14 kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan dan 180 desa. Sebelum diterapkannya otonomi daerah, Kabupaten Sampang pada awalnya terdiri atas 12 Kecamatan. Belakangan sejak dikeluarkannya Perda No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang mengalami pemekaran menjadi 14 Kecamatan (6 kelurahan dengan 180 desa). Masing-masing merupakan kecamatan terluas (Kecamatan Banyuates dengan wilayah terluas 141,03 Km² atau 11,44 % dari keseluruhan

wilayah Kabupaten Sampang) dan kecamatan terkecil (Kecamatan Pangarengan dengan 42,7 Km² (3,46 %)).¹

Secara administratif, Kabupaten Sampang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sementara itu, di sebelah timur, Sampang berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan dan sebelah barat dengan Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya dan dapat ditempuh melalui Jembatan Suramadu (selama kurang lebih 5 menit) kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama ± 1,5 jam.

Berdasarkan geologinya, Kabupaten Sampang memiliki 5 macam batuan yaitu alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu gamping dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies sedimen banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, sementara sebagian kecil jenis batuan plistosen fasies sedimen dipakai untuk tegalan. Sementara itu, dilihat dari jenis tanah, Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol adalah yang terbanyak dengan luas 54.335 Ha. Jenis tersebut diikuti oleh jenis Alluvial Hidromorf dengan luas sekitar 10.720 Ha. Adapun proporsi jenis tanah terendah adalah Grumosol Kelabu yang hanya terdapat di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong dengan luas 2.125 Ha.

Adapun kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Sampang dapat diklasifikasi dalam lima kategori, yaitu < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm, 90 - 120 cm dan > 120 cm. Di antara kelimanya, kedalaman efektif tanah > 120 cm adalah yang

¹ Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang cipta Karya Kabupaten Sampang 2017-2021

paling mendominasi, yakni seluas 74.796 ha atau 60,65 %. Tanah dengan kedalaman efektif tersebut adalah sebanyak 986 Ha atau sekitar 0,79 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sampang yang mencapai 123.330 Ha.

Sementara itu, hidrologi di Kabupaten Sampang meliputi air permukaan dan air tanah yang penggunaannya didominasi untuk pelayanan irigasi. Air permukaan terdiri dari sungai, waduk dan embung. Mayoritas sungai yang terdapat di Kabupaten Sampang merupakan sungai musiman yang ada airnya hanya pada musim penghujan. Menurut letaknya, 34 buah sungai di Kabupaten Sampang terletak di wilayah Sampang Selatan dan Sampang Utara.

Selain itu, terdapat dua waduk di Kabupaten Sampang. *Pertama* adalah Waduk Klampis di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, yang merupakan waduk terbesar di Kabupaten Sampang. Fungsi utama waduk yang luasnya 2.603 ha tersebut adalah menyediakan irigasi untuk areal sawah. *Kedua* adalah Waduk Nipah di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, yang luasnya 1.150 ha. Adapun potensi embung di Kabupaten Sampang utamanya terdapat pada wilayah Sampang bagian tengah yaitu Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang dan Omben. Di sisi lain, kedalaman air tanah di Kabupaten Sampang secara rata-rata dapat mencapai 75 m sehingga dapat dikategorikan kelas dalam. Kedalaman air tanah yang paling tinggi adalah di Kecamatan Sokobanah yakni sedalam 100 m, sedangkan kedalaman air tanah terendah terletak di Kecamatan Sampang dengan kedalaman 60 m.

Kabupaten Sampang mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara Oktober sampai dengan April dan musim kemarau berlangsung antara April sampai Oktober. Rata-rata curah

hujan di Kabupaten Sampang adalah sekitar 91, 78 mm/tahun, sedangkan rata-rata jumlah hari-hari hujan mencapai 6,47 hh/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungdung (173, 58 mm/tahun), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sreseh.

1. Peta Riset Sosial Keagamaan

No	Topik	Fokus Topik	Deskripsi Kualitatif	Deskripsi Kuantitatif
1	<p><i>Policy studies</i> tentang berbagai aturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah pada persoalan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan keagamaan Madura</p>	<p><i>Policy studies</i> bidang ekonomi tata niaga garam</p>	<p>Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidayaan Ikan dan Tambak Garam masih bersifat normatif sehingga tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan problem pokok garam nasional. Pendampingan dan pembinaan, misalnya, hanya menyentuh pada permukaan persoalan. Mestinya, pemerintah daerah fokus menyelesaikan persoalan utama berupa integrasi antara kebijakan lembaga negara dengan <i>stake holder</i> pergaraman untuk mampu meningkatkan kualitas garam secara nasional dan kuantitas hasil produksi garam industri.</p>	<p>Data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2017, Sumenep adalah penghasil garam terbesar se-Jawa Timur yaitu 126.662 ton. Sumenep menjadi penghasil garam terbesar kedua setelah Inderamayu sebanyak 167.930 ton. Tahun 2018, Sampang menjadi kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia dengan mengalahkannya Inderamayu sebanyak 312.061 ton. Tidak ada <i>update</i> data terbaru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

<p>d. Tidak ada data klasifikasi data garam industri dan garam konsumsi</p>			
<p>Data lahan tambak di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: e. Tahun 2013: 5.545 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.523,27 ha f. Tahun 2015: 4.382,7 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.440,31 ha g. Tahun 2017: 2.814 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.543,14 ha h. Tahun 2019: 2.814 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.334,10 ha Prosentase kepemilikan lahan pada tahun 2013: 78% lahan rakyat 22% lahan PT Garam</p>	<p>Persoalan garam di Indonesia senantiasa menjadi polemik yang menarik dibicarakan baik pada skala ekonomi makro maupun kebijakan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Problematika ini juga terjadi di Madura yang <i>notabene</i> merupakan salah satu penghasil garam di tanah air. Tidak adanya integrasi dan keterbukaan data tentang kebutuhan dan hasil produksi garam merupakan titik awal munculnya persoalan karena masyarakat, baik petani maupun pedagang garam, susah mendapatkan akses yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjaga keseimbangan hasil produksi dengan daya serap distribusinya.</p> <p>Persoalan kedua adalah potensi masuknya pasar garam impor industri pada pasar garam konsumsi karena kekeliruan kalkulasi estimasi kebutuhan serta lemahnya pengawasan pemerintah</p>	<p>Garam dan kesejahteraan petani Madura</p>	<p>2 Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>

terhadap distribusi garam industri tersebut. Persoalan ketiga adalah rendahnya hasil produksi garam industri di Madura yang *notabene* merupakan sasaran distribusi garam di Indonesia karena memiliki daya serap sangat tinggi dibandingkan dengan daya serap garam konsumsi.

Hal yang menarik pada pesisir selatan Sampang adalah adanya kepemilikan tambak garam yang prosentasinya lebih banyak dimiliki masyarakat daripada PT Garam. Kepemilikan ini semakin seksi digali ketika mayoritas pemilikinya adalah keturunan "*bhujuk*" yang bernama Maronah. Artinya, kepemilikan tambak ini bersifat turun temurun kendatipun beberapa tambak sudah berpindah tangan kepada pengusaha garam lainnya. *Bhujuk Maronah* adalah tokoh yang datang pertama kali ke daerah Pangarengan dan menjadi sosok yang melakukan "*babat alas*" (*ihya' al mawat*) sehingga kepemilikan lahan mayoritas dimiliki oleh *bhujuk* ini dan keturunannya.

Merosotnya jumlah lahan diakibatkan perubahan peruntukan seperti perluasan pemukiman dan pertokoan.

<p>3</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan berupa optimalisasi penggunaan lahan tidak produktif</p>	<p>Pada masyarakat perbukitan, ditemukan fenomena lahan yang tidak produktif akibat urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota dan tidak adanya perhatian dari perangkat desa terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Fenomena ini terjadi pada desa yang masuk pada kategori Desa merah. Beberapa masyarakat menginginkan optimalisasi penggunaan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif semisal pengembangan usaha ternak dan pakan ternak</p>	<p>Luas lahan pertanian Kabupaten Sampang: 2015: 113.212 ha 2019: 99.743 ha. Lahan pertanian tersebut terbagi menjadi lahan produktif dan lahan tidak produktif</p>
<p>4</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Pengembangan potensi wisata Kabupaten Sampang dengan memanfaatkan hasil produksi garam</p>	<p>Pembukaan jalur selatan yang menghubungkan Pangarengan dengan Sreseh menjanjikan sentra ekonomi baru berbasis pesisir, misalnya pembangunan <i>rest area</i> yang menjadi destinasi ekonomi dan ekologi wisata garam di pesisir Selatan. Salah satu bentuknya adalah kuliner, mandi sauna, masker dan pembersih wajah berbasis garam serta edu wisata garam</p>	<p>Pada tahun 2019, Kabupaten Sampang memiliki 17 destinasi wisata yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah: Pulau Mandangin, Pantai Camplong, Pantai Lon Malang, Waduk Kampis, Makam Ratu Ibu, Air Terjun Toroan, Pebabaran, Trunojoyo, Wisata Rimba, Monyet Napa, Gua Lebar, Bukit Masegit,</p>

				<p>Pemandian Potre Koning, Sumber Joko Tole Omben, Gua Kelelawar, Gua Macan, Gunung Maddah, Bukit Jodoh, dan Waduk Nipah</p>
<p>5</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Kajian kemiskinan Desa Merah di Kabupaten Sampang</p>	<p>Sampang merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Sampang salah satunya diakibatkan faktor geografis (<i>geographical conditions</i>). Sementara menurut hasil survey terhadap Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat, ditengarai bahwa penyebab kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia. Ketidaksinkronan antara data BPS dan hasil survey tersebut menjadi kemungkinan ketiga penyebab kemiskinan di Kabupaten Sampang, yakni lemahnya koordinasi dan integrasi antarlembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercermin dalam persoalan garam.</p>	<p>Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sampang: Tahun 2020: 224.000 jiwa Tahun 2021: 237.000 jiwa</p>
<p>6</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Lingkungan hidup (pantai dan pegunungan);</p>	<p>Penambangan pasir dan reklamasi mangrove ekosistem pantai dan laut. Kegiatan penambangan dan reklamasi tersebut dapat mengakibatkan abrasi di</p>	<p>Panjang pantai Kabupaten Sampang adalah 28,08 km</p>

7	Dinamika Sosial-Politik-Budaya Madura	<p>Pengembangan kualitas kepemimpinan desa (Kepemimpinan <i>klebun</i> yang aspiratif,</p>	<p>Persoalan penanganan abrasi di sepanjang pantai Sampang</p>	<p>sepanjang pantai Sampang. Data hasil penelitian tentang analisis perubahan garis pantai di pulau Madura dengan menggunakan citra satelit landsat 8 mengungkapkan adanya perubahan garis yang diakibatkan adanya perubahan garis di sepanjang pantai. Dalam perspektif sosial sains, upaya memahami masyarakat terhadap dampak penambangan pasir dan reklamasi yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai dan laut berupa akresi dan abrasi perlu dilakukan agar muncul kesadaran intelektual dan spiritual sehingga masyarakat tergerak melakukan tindakan bersama untuk melakukan rehabilitasi ekosistem. Hal itu bisa dilakukan dengan program yang bisa dilakukan bersama-sama masyarakat.</p> <p>a. Fenomena kepala desa yang dipilih berdasarkan pertimbangan emosional (kedekatan famili-profesi-organisasi dan kebaikan karitatif-tentatif-politis) dan pragmatisme (<i>money politics</i>) daripada alasan rasional (<i>track record</i> kepemimpinan/tanggung jawab,</p>	<p>Data yang dibutuhkan dan belum diperoleh:</p> <p>a. Data Desa Merah dan latarbelakang kepala desa</p>
---	---------------------------------------	--	--	--	--

		akuntabel, dan visioner)	<p>riwayat pendidikan, kepribadian yang dan terbuka).</p> <p>b. Pertimbangan pragmatisme lain dalam memilih kepala desa di mana masyarakat memiliki kecenderungan kepemimpinan desa dengan profil berlatarbelakang <i>bajing/blater</i> karena dinilai memiliki jaringan yang dibutuhkan untuk, misal, memperoleh rasa aman (dari kejahatan kriminal dan mendapatkan bantuan dari persoalan-persoalan hukum).</p> <p>c. Akibatnya, tidak sedikit ditemukan pembangunan desa dan program-programnya yang tidak berjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya karena rendahnya kualitas tradisional pemimpin formal desa yang menyebabkan rendahnya mutu manajemen <i>good government</i> desa.</p>	b. Data Desa Hijau dan latarbelakang kepala desa
8	Dinamika Sosial-Politik-Budaya Madura	Perwujudan nilai (etiket, <i>tengka</i>) etika Madura dalam acara-acara sosial-keagamaan di Sampang	<p>a. Pola dan tuntutan kehidupan modern mendorong masyarakat terlibat dalam acara-acara sosial-keagamaan secara praktis dan individualistik.</p> <p>b. Di lain pihak, tokoh-tokoh masyarakat tetap memainkan dan meneguhkan</p>	-

9	Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Penguatan profesi dan <i>skill</i> tradisional Madura (tukir, pandai besi, nelayan, petani); Revitalisasi minat dan peran generasi muda terhadap bidang pekerjaan konvensional	<p>peran-peran simbolik tradisionalnya justru di saat masyarakat—pada batas tertentu—kian egaliter secara sosial.</p> <p>c. Terjadi adaptasi-adaptasi artifisial terhadap kode-kode sosial dan nilai-nilai kepatutan, seperti mewakilkan kehormatan untuk suatu acara sosial-keagamaan kepada anak-anak yang datang dengan pakaian tidak standar</p> <p>a. Modernisasi membawa dampak terhadap <i>mindset</i> generasi muda dalam memilih pekerjaan yang praktis dan pragmatis (tidak bergantung terhadap alam)</p> <p>b. Citra pekerjaan konvensional di kalangan angkatan kerja muda yang dinilai tidak menjanjikan kepastian peningkatan kesejahteraan ekonomi, membutuhkan jauh lebih banyak energi fisik, dan terkesan tradisional.</p> <p>c. Ancaman krisis generasi penerus bidang-bidang pekerjaan konvensional serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kebergantungan produk luar</p>	
				<p>Data yang dibutuhkan dan belum diperoleh:</p> <p>a. Data tenaga kerja dan profesi Kabupaten Sampang</p>

<p>10</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata.</p>	<p>Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan; Pemanfaatan dan pengelolaan ekonomi desa berbasis sumber daya alam desa</p>	<p>a. Kondisi desa dan sumber daya alamnya (SDA) menjadi alasan yang sering dikeluhkan daripada persoalan sumber daya manusia yang rendah. b. Seiring perkembangan sains dan semakin tingginya angka masyarakat yang terdidik, potensi SDA desa yang dapat dikelola untuk pengembangan ekonomi desa mendesak untuk dilihat secara serius dan komprehensif. c. Di desa-desa dataran tinggi Sampang yang banyak ditinggalkan oleh generasinya untuk urbanisasi, tidak sedikit lahan tidak produktif yang dapat dimanfaatkan untuk <i>integrated farming system</i> (integrasi antara pertanian, perikanan dan peternakan). d. Rendahnya komitmen pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alam menjadi salah satu kendala untuk mendorong dan mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan</p>	<p>Data yang dibutuhkan dan sedang didalami:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data geografi dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi desa Data <i>human development index</i> (indeks pembangunan manusia)
-----------	--	--	---	---

Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura.

Model dan pola dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat); Moderasi beragama masyarakat di era kesemrawutan informasi dan meningkatnya sensitifitas politik umat Islam

- a. Keterbukaan dan kemelimpahan informasi mampu menciptakan sentimen dan pandangan negatif masyarakat yang tidak memiliki bekal literasi memadai
- b. Seiring hal tersebut, semakin luasnya atensi/kesadaran/keterlibatan umat Islam terhadap wacana eksistensi Islam dibajak oleh isu-isu politik sektarian yang pada gilirannya membawa-bawa al-Quran dan hadits
- c. Karakter masyarakat Sampang yang religius dan fanatik rentan terhadap residu *digital disruption* dan agitasi gerakan Islam politik yang semakin menguat akhir-akhir ini dengan pola pencitraan kriminalisasi dan marjinalisasi umat
- d. Diperlukan model dan pola dakwah pendidikan keagamaan yang berorientasi pada moderasi beragama dalam konteks eksekutif era *post-truth* dan *digital disruption* yang telah menciptakan kekacauan referensial terutama yang berkenaan dengan al-Quran dan hadits yang mengancam karakter moderat kebudayaan Islam.

<p>12</p>	<p>Persoalan Sosial Keagamaan dan Ekonomi Pekerja Migran</p>	<p>Problem sosial-budaya dan perlindungan terhadap pekerja migran</p>	<p>a. Bekerja di luar negeri/Madura masih menjadi opsi terbuka bagi masyarakat Sampang karena info dan harapan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi b. Banyak dijumpai tempat tinggal mewah dan kendaraan memadai sebagai tanda sukses bekerja di luar negeri/Madura yang menarik minat dan mimpi masyarakat untuk menajjal keberuntungan dengan cara yang sama. c. Ketidapkahaman atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk bekerja secara legal menyebabkan banyak pekerja migran Madura tidak terjangkau perlindungan hukum d. Pekerja migran lebih rentan memiliki masalah keluarga karena tidak lagi terlibat dalam pengawasan pasangan dan pengawasan terhadap pendidikan dan pergaulan anak dalam kondisi situasi ekonomi yang (justru cenderung) membaik</p>	<p>Data yang dibutuhkan dan belum diperoleh: a. Data valid jumlah pekerja migran legal dan ilegal</p>
-----------	--	---	--	--

2. Peta Pengabdian Masyarakat

No	Topik	Model Pengabdian	Deskripsi Kualitatif	Deskripsi Kuantitatif
1	<p><i>Policy studies</i> tentang berbagai aturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah pada persoalan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan keagamaan Madura</p>	<p>Ketika kebijakan sudah dibentuk berdasarkan hasil riset dengan tidak mengabaikan aspek formulasi, legitimasi, implementasi dan evaluasinya, <i>Participatory Action Research</i> merupakan langkah berikutnya untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut menjadi tindakan (<i>action</i>) untuk memecahkan persoalan. Model pengabdian berbasis kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dengan 2 jenis kegiatan, yaitu: Interdisipliner (kombinasi latar belakang keilmuan</p>	<p>Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan tambak garam masih bersifat normatif sehingga tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan problem pokok garam nasional seperti pendampingan dan pembinaan yang hanya menyentuh pada permukaan persoalan. Mestinya pemerintah daerah fokus menyelesaikan persoalan utama berupa integrasi antara kebijakan lembaga negara dengan <i>stake holder</i> pergaraman sehingga mampu meningkatkan kualitas garam secara nasional dan kuantitas hasil produksi garam industri.</p>	<p>Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2017, Sumenep penghasil garam terbesar se Jawa Timur yaitu 126.662 ton. Sumenep menjadi penghasil garam terbesar kedua setelah Inderamayu sebanyak 167.930 ton Tahun 2018, Sampang menjadi Kabupaten penghasil garam terbesar di Indonesia dengan mengalahkan Inderamayu sebanyak 312.061 ton. Tidak ada <i>update</i> data terbaru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

<p>d. Tidak ada data klasifikasi data garam industri dan garam konsumsi</p>	<p>Data lahan tambak di Kabupaten Sampang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahun 2013: 5.545 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.523,27 ha b. Tahun 2015: 4.382,7 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.440,31 ha c. Tahun 2017: 2.814 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.543,14 ha d. Tahun 2019: 2.814 ha Citra Satelit Landsat 8: 3.334,10 ha
<p>berbeda) dan berbasis prodi dengan melakukan pengembangan dan pendalaman sesuai bidangnya.</p>	<p>Persoalan garam di Indonesia senantiasa menjadi polemik yang menarik dibicarakan baik pada aspek skala ekonomi makro maupun kebijakan Pemerintah dalam memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Problematika ini juga terjadi di Madura yang notabene salah satu penghasil garam di Tanah Air. Tidak adanya integrasi dan keterbukaan data tentang kebutuhan dan hasil produksi garam merupakan titik awal munculnya persoalan karena masyarakat baik petani maupun pedagang susah mendapatkan akses yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjaga keseimbangan hasil produksi dengan daya serap distribusinya.</p>
<p>2</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Kajian tentang garam dan kesejahteraan petani Madura)</p>
<p>berbeda) dan berbasis prodi dengan melakukan pengembangan dan pendalaman sesuai bidangnya.</p>	<p>Pengabdian berbasis riset dengan pendekatan <i>Participatory Action Research, Asset Based Community Development</i> dan <i>Community Based Research</i>.</p>

Persoalan kedua adalah potensi masuknya pasar garam impor industri pada pasar garam konsumsi karena kekeliruan kalkulasi estimasi kebutuhan serta lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap distribusi garam industri tersebut. Persoalan ketiga adalah rendahnya hasil produksi garam industri di Madura yang notabene merupakan sasaran distribusi garam di Indonesia karena memiliki daya serap sangat tinggi dibandingkan dengan daya serap garam konsumsi. Hal yang menarik pada pesisir selatan Sampang adalah adanya kepemilikan tambak garam yang prosentasinya lebih banyak dimiliki masyarakat daripada PT Garam. Kepemilikan ini semakin seksi digali ketika mayoritas pemiliknya adalah keturunan “*bhujuk*” yang bernama Maronah. Artinya kepemilikan tambak ini bersifat turun temurun kendatipun beberapa tambak sudah berpindah tangan kepada pengusaha garam lainnya. *Bhujuk* Maronah adalah tokoh yang datang

Prosentase kepemilikan lahan pada tahun 2013: 78% lahan rakyat 22% lahan PT Garam Merosotnya jumlah lahan diakibatkan perubahan peruntukan seperti pemukiman dan pertokoan.

	<p>pertama kali datang ke daerah Pangarengan dan menjadi sosok yang melakukan “<i>babat alas</i>” (<i>ihya al mawat</i>) sehingga kepemilikan lahan mayoritas dimiliki oleh <i>bhujuk</i> ini dan keturunannya.</p>			
<p>3</p>	<p>Luas lahan pertanian Kabupaten Sampang: 2015: 113.212 ha 2019: 99.743 ha Lahan pertanian tersebut terbagi menjadi lahan produktif dan lahan tidak produktif</p>	<p>Pada masyarakat perbukitan, ditemukan fenomena lahan yang tidak produktif akibat urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota dan tidak adanya perhatian dari perangkat desa terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Fenomena ini terjadi pada desa yang masuk pada kategori Desa Merah. Beberapa warga menginginkan optimalisasi penggunaan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif semisal pengembangan usaha ternak dan pakan ternak.</p>	<p>Menggunakan kombinasi <i>Service Learning</i> dengan pendekatan PAR, ABCD dan CBR.</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan)</p>
<p>4</p>	<p>Pada tahun 2019, Kabupaten Sampang memiliki 17 destinasi wisata yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah:</p>	<p>Pembukaan jalur selatan melalui jembatan penghubung Pangarengan dengan Sreseh menjanjikan sentra ekonomi baru berbasis pesisir, misalnya pembangunan <i>rest area</i> yang menjadi destinasi ekonomi</p>	<p>Menggunakan kombinasi <i>Service Learning</i> dengan pendekatan PAR, ABCD dan CBR.</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Pengembangan potensi wisata Madura)</p>

<p>Pulau Mandangin Pantai Camplong Pantai Lon Malang Waduk Kampis Makam Ratu Ibu Air Terjun Toroan Pebabaran Trunojoyo Wisata Rimba Monyet Nepa Gua Lebar Bukit Masegit Pemandian Potre Koning Sumber Joko Tole Omben Gua Kelelawar Gua Macan Gunung Maddah Bukit Jodoh Waduk Nipah</p>	<p>dan ekologi wisata garam di pesisir selatan. Salah satu bentuknya adalah kuliner, mandi sauna, masker dan pembersih wajah berbasis garam serta edu wisata garam</p>			
<p>Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sampang: Tahun 2020: 224.000 jiwa Tahun 2021: 237.000 jiwa</p>	<p>Sampang merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Persoalan kemiskinan desa di Kabupaten Sampang disebutkan, salah satunya</p>	<p>Menggunakan kombinasi Service Learning dengan pendekatan PAR, ABCD dan CBR.</p>	<p>5 Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Kajian kemiskinan Madura)</p>	

	<p>akibat faktor geografis (<i>geographical conditions</i>). Sementara menurut hasil survey terhadap Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat bahwa penyebab kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia. Ketidak sinkronan antara data BPS dan hasil survey tersebut menjadi kemungkinan ketiga penyebab kemiskinan di Kabupaten Sampang adalah lemahnya koordinasi dan integrasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercermin dalam persoalan garam.</p>			
<p>Panjang pantai Kabupaten Sampang adalah 28,08 km Data berdasarkan kombinasi Citra Satelit Landsat 8 dan Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Penambangan pasir dan reklamasi mengancam ekosistem pantau dan laut. Kegiatan penambangan dan reklamasi tersebut dapat mengakibatkan abrasi di sepanjang pantai Sampang. Data hasil penelitian tentang analisis perubahan garis pantai di pulau Madura dengan menggunakan citra satelit landsat 8 mengungkapkan adanya perubahan garis yang diakibatkan oleh adanya abrasi</p>	<p>Menggunakan kombinasi Service Learning dengan pendekatan PAR, ABCD dan CBR.</p>	<p>6 Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Pantai dan pegunungan)</p>	

	<p>dan akresi di sepanjang pantai. Dalam perspektif sosial sains, problem pemahaman masyarakat terhadap dampak penambangan pasir dan reklamasi yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai dan laut berupa akresi dan abrasi perlu dilakukan agar supaya muncul kesadaran intelektual dan spiritual dan tergerak melakukan tindakan bersama untuk melakukan rehabilitasi ekosistem. Hal itu bisa dilakukan dengan program yang bisa dilakukan bersama-sama masyarakat.</p>		
<p>Data yang dibutuhkan dan belum diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data desa merah dan latarbelakang kepala desa b. Data desa hijau dan latarbelakang kepala desa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Fenomena kepala desa yang dipilih berdasarkan pertimbangan emosional (kedekatan famili-profesi-organisasi dan kebaikan karitatif-tentatif-politis) dan pragmatisme (<i>money politics</i>) daripada alasan rasional (track record kepemimpinan/tanggungjawab, pendidikan, kepribadian yang terbuka). 	<p>Metode pengabdian yang dapat diambil adalah <i>Community Based Research</i> (CBR) yang definisikan sebagai model penelitian transformatif yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan perubahan sosial yang menempatkan</p>	<p>7 Dinamika Sosial Politik-Budaya di Madura (Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Desa)</p>

	<p>masyarakat yang peduli untuk berperan serta bukan sebagai subyek penelitian, tetapi sebagai mitra kerja sama dan agen untuk memecahkan persoalan.</p>	<p>b. Pertimbangan pragmatisme lain, masyarakat memiliki kecenderungan kepemimpinan desa dengan profil berlatarbelakang <i>bajing/blater</i> yang dinilai memiliki jaringan koneksi yang dibutuhkan masyarakat untuk, misal, memperoleh rasa aman (dari kejahatan kriminal mendapatkan bantuan dari persoalan-persoalan hukum).</p> <p>c. Akibatnya, tidak sedikit ditemukan pembangunan desa dan program-programnya yang tidak berjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya disebabkan kualitas tradisional pemimpin formal desa yang memberi dampak terhadap rendahnya mutu manajemen <i>good government</i> desa.</p>	
8	<p>Dinamika Sosial Politik-Budaya di Madura (<i>Tengka Madura</i>; Nilai</p>	<p>Metode pengabdian yang dapat diambil adalah Community Based Research (CBR)</p>	<p>a. Pola dan tuntutan kehidupan modern mendorong masyarakat terlibat dalam acara-acara sosial-keagamaan secara praktis dan individualistik.</p>

	<p>b. Di lain pihak, tokoh-tokoh masyarakat tetap memainkan dan meneguhkan peran-peran simbolik tradisionalnya justru di saat masyarakat pada batas tertentu yang semakin luas, kian egaliter secara sosial</p> <p>c. Terjadi adaptasi-adaptasi artifisial terhadap kode-kode sosial dan nilai-nilai kepatutan, seperti mewakilkan kehadiran untuk suatu acara sosial-keagamaan kepada anak-anak yang datang dengan pakaian tidak standar</p>	<p>untuk mengupayakan reaktualisasi prinsip-prinsip etika sosial yang menempatkan mitra kerja sama dan agen untuk memecahkan persoalan.</p>	<p>dan prinsip bermasyarakat atau etika Madura)</p>
<p>9</p>	<p>a. Modernisasi membawa dampak terhadap <i>mindset</i> generasi muda dalam memilih pekerjaan yang praktis dan pragmatis (tidak bergantung terhadap alam)</p> <p>b. Citra pekerjaan konvensional di kalangan angkatan kerja muda yang dinilai tidak menjanjikan kepastian peningkatan kesejahteraan ekonomi, membutuhkan jauh lebih banyak</p>	<p>Metode pengabdian yang dapat dipilih adalah <i>Asset Based Communities Development (ABCD)</i> sebagai model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Penguatan pekerjaan dan skill tradisional Madura (tukir, pandai besi, nelayan, petani)</p>
			<p>Data yang dibutuhkan dan belum diperoleh:</p> <p>a. Data kerja dan profesi kabupaten Sampang</p>

10	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan)</p>	<p>yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Model pengabdian ini berbasis kemitraan dengan instansi terkait dan kelompok profesi.</p>	<p>energi fisik, dan terkesan tradisional.</p> <p>c. Ancaman krisis generasi penerus bidang-bidang pekerjaan konvensional serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kebergantungan produk luar</p>	<p>Data yang dibutuhkan dan sedang didalami:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data geografi dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi desa Data <i>human development index</i> (indeks pembangunan manusia)
		<p>Metode pengabdian yang dapat dipilih adalah <i>Asset Based Communities Development (ABCD)</i> sebagai model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Model pengabdian ini berbasis kemitraan</p>	<p>a. Kondisi desa dan sumber daya alamnya (SDA) menjadi alasan yang sering dikeluarkan daripada persoalan sumber daya manusia yang rendah</p> <p>b. Seiring perkembangan dan perkembangan sains berikut semakin tingginya angka terdidik masyarakat, dapat dilihat potensi SDA desa yang dapat dikelola untuk pengembangan ekonomi desa</p> <p>c. Di desa-desa dataran tinggi Sampanyang yang banyak ditinggalkan oleh generasinya untuk urban, tidak sedikit lahan tidak produktif yang dapat dimanfaatkan untuk <i>integrated</i></p>	

	<p><i>farming system</i> (integrasi antara pertanian, perikanan dan peternakan)</p> <p>d. Rendahnya komitmen pemerintahan desa untuk mengelola sumber daya alam, menjadi salah satu kendala pokok faktor pendorong dan fasilitator pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan</p>	<p>dengan instansi terkait dan kelompok profesi.</p>		
	<p>a. Keterbukaan dan kemelimpahan informasi mampu menciptakan sentimen dan pandangan negatif masyarakat yang tidak memiliki bekal literasi memadai.</p> <p>b. Seiring hal tersebut di atas, semakin luasnya atensi/kesadaran/keterlibatan umat Islam terhadap wacana eksistensi Islam dibajak oleh isu-isu politik sektarian yang pada gilirannya membawa-bawa al-Quran dan hadits</p> <p>c. Karakter masyarakat Sampang yang religius dan fanatik, rentan terhadap residu digital disruption</p>	<p>Metode pengabdian yang dapat dipilih adalah <i>Asset Based Communities Development (ABCD)</i> sebagai model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>11 Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura (Model dan pola dakwah Madura/ pendidikan keagamaan Masyarakat)</p>	

	<p>Model pengabdian ini berbasis kemitraan dengan instansi terkait dan kelompok profesi.</p>	<p>dan agitas gerakan Islam politik yang semakin menguat akhir-akhir ini dengan pola pencitraan kriminalisasi dan marginalisasi umat</p> <p>d. Diperlukan model dan pola dakwah pendidikan keagamaan yang berorientasi pada moderasi beragama dalam konteks akses negatif era <i>post-truth</i> dan <i>digital disruption</i> yang telah menciptakan kekacauan referensial terutama yang berkenaan dengan al-Quran dan hadits yang mengancam karakter moderat kebudayaan Islam.</p>	
<p>12</p>	<p>Persoalan Sosial Keagamaan dan Ekonomi Pekerja Migran</p>	<p>e. Bekerja di luar negeri/Madura masih menjadi opsi terbuka bagi masyarakat Sampang karena info dan harapan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi</p> <p>f. Banyak dijumpai tempat tinggal yang bagus dan kendaraan yang memadai sebagai tanda sukses bekerja di luar negeri/Madura</p>	<p>Data yang dibutuhkan dan belum diperoleh:</p> <p>a. Data valid pekerja migran legal dan illegal</p>

yang menarik minat dan mimpi masyarakat

- g. Ketidapkahaman atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk bekerja secara legal menyebabkan banyak pekerja migran Madura tidak terjangkau perlindungan hukum
- h. Pekerja migran lebih rentan memiliki masalah keluarga karena tidak lagi terlibat dalam pengawasan terhadap istri dan pengawasan terhadap pendidikan dan pergaulan anak, justru dalam kondisi situasi ekonomi yang membaik

B. Kabupaten Pamekasan

Secara administratif, Kabupaten Pamekasan terletak pada 6°51'-7°31' Lintang Selatan dan 113°19'- 113°58' Bujur Timur. Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan berada di Kecamatan Pegantenan yang mencapai 350 m dari permukaan laut sementara yang terendah berada di Kecamatan Galis dengan 6 m dari permukaan laut. Jenis tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari alluvial regosol, mediteran dan litasol. Temperatur maksimum di Kabupaten Pamekasan adalah 30° celcius, sementara ukuran minimumnya adalah 28° celcius dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 80%. Seperti daerah lain di Indonesia, dalam satu tahun, Kabupaten Pamekasan mengalami dua musim, yakni musim penghujan pada Oktober- April dan musim kemarau pada April-Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, struktur tanah yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih kekurangan *supply* air hujan yang maksimal.

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Selama satu dekade, jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Namun demikian belakangan, melihat perkembangan jumlah penduduk yang cenderung meningkat sekaligus jangkauan wilayahnya, dilakukan pemekaran di tingkat desa. Ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik.

1. Peta Riset Sosial Keagamaan

No	Topik	Fokus Topik	Deskripsi Kualitatif	Deskripsi Kuantitatif
1	<p><i>Policy studies</i> tentang berbagai perundang-undangan, PP dan PERDA seputar persoalan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan keagamaan Madura</p>	<p>Tata niaga garam dan tembakau</p>	<p>a. Adanya ketimpangan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat kepada petani garam, petani tembakau dll</p> <p>b. Buruh garam pada masa panen sudah mulai tidak dibutuhkan dikarenakan digantikan oleh mesin</p> <p>c. Negara mulai melakukan impor garam, sehingga produktivitas garam di Madura menurun</p> <p>d. Belum ada penentuan oleh pemerintah terhadap harga standard tembakau, sehingga terjadi ketimpangan (harga tembakau ditentukan oleh tengkulak)</p> <p>e. Pemihakan pemerintah terhadap petani tembakau terkesan hanya <i>lip service</i>, karena harga tembakau terus menurun dari tahun ke tahun. Tembakau bukan lagi daun emas.</p>	<p>Tahun 2019, jumlah impor garam di Indonesia sebanyak 2.595.397,3 ton. Dari jumlah tersebut, produksi garam di Pamekasan adalah 128.427.42 ton</p>
2	<p>Persoalan Sosial Keagamaan dan Ekonomi (Keluarga) Pekerja Migran</p>	<p>Dampak sosial yang dialami oleh anak pekerja migran</p>	<p>a. Pendidikan keagamaan anak keluarga pekerja migran kurang tertangani karena biasanya dititip ke orang tua ada saudara.</p>	<p>Jumlah pekerja migran yang ada di Jatim adalah sebanyak 2.093 pada 2020. Jumlah pekerja</p>

			<p>b. Sebagian anak keluarga pekerja migran bergaya hidup hedonistik, sehingga kurang mencerminkan ketaatan pada agama</p>	<p>migran di Pamekasan harus dicek di Dinas Ketenagakerjaan</p>
<p>3</p>	<p>Dinamika Sosial Politik Budaya di Madura</p>	<p>Problem narkoba dan kenakalan remaja; Penyebab banyaknya kasus narkoba dan kenakalan remaja di daerah Pantura Pamekasan</p>	<p>a. Faktor-faktor kenakalan remaja dan narkoba di daerah Pantura b. Kiriman uang lebih dari orang tua keluarga pekerja migran bisa disalahgunakan anak untuk narkoba dan kenakalan remaja c. Mafia narkoba dalam bentuk jejaring/komunitas tertentu, termasuk di kalangan tokoh kultural setempat, rentan menyasar remaja</p>	<p>Jumlah kasus yang terjadi</p>
<p>4</p>	<p>Persoalan Sosial Keagamaan dan Ekonomi (Keluarga) Pekerja Migran</p>	<p>Dampak sosial yang dialami anak pekerja migran; Pola pengasuhan anak pekerja migran</p>	<p>a. Jumlah kasus perceraian pada pekerja migran b. Pola keluarga pada keluarga migran (anak dibawa merantau, tidak dibawa, ayah merantau ibu di rumah, ibu merantau ayah di rumah, dan seterusnya) c. Sebagian anak keluarga pekerja migran dimondokkan/disekolahkan ke pesantren.</p>	<p>a. Jumlah pekerja migran yang ada di Pamekasan b. Angka perceraian tenaga kerja migran</p>

<p>5</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Tembakau dan garam serta kesejahteraan petani Madura; Belum adanya <i>policy</i> yang mengatur</p>	<p>a. Adanya ketimpangan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat kepada petani garam, petani tembakau dll b. Buruh garam pada masa panen sudah mulai tidak dibutuhkan dikarenakan digantikan oleh mesin c. Negara mulai melakukan impor garam, sehingga produktivitas garam di Madura menurun d. Belum ada penentuan oleh pemerintah terhadap harga tembakau, sehingga terjadi ketimpangan (harga tembakau ditentukan oleh tengkulak) e. Pemerintah terkesan lebih memihak ke pengusaha rokok dibanding petani tembakau</p>	<p>Jumlah produksi tembakau di Pamekasan pada 2019 adalah 20.881 ton</p>
<p>6</p>	<p>Pengembangan (Lembaga) Pendidikan dan Pusat-pusat Studi di Madura</p>	<p>Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, pusat studi halal <i>centre</i>, pusat studi</p>	<p>a. Mayoritas pendidikan anak Madura dimulai di pesantren. Jika tidak, maka akan dianggap tabu. b. Pusat studi ziswak akan terfokus pada <i>waqaf</i> karena luasnya tanah wakaf dan beragamnya persoalan <i>waqaf</i> di Madura.</p>	<p>a. Jumlah pesantren yang ada di Madura dan sekitarnya. b. Ada 231 pesantren yang tercatat di Pamekasan</p>

7	Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata	ziswa; Pusat studi pesantren, pusat studi ziswa Manajemen sampah pada lembaga dan masyarakat ; Sampah yang dihasilkan pesantren	c. Pamekasan sebagai pusat pemerintahan (keresidenan) a. Belum tersentuh teknologi pengolahan sampah b. Belum betul-betul mempraktikkan ajaran Islam tentang kebersihan. c. Belum ada kesadaran tentang efek negatif dan manfaat pengelolaan sampah dalam jangka panjang. d. Tidak sedikit yang menganggap bahwa urusan sampah adalah problem remeh-temeh, termasuk tidak merasa bersalah ketika limbah dibuang ke laut/sungai.	a. Jumlah pesantren b. Jumlah santri c. Volume sampah tahunan/bulanan.
8	Pengembangan (Lembaga) Pendidikan dan Pusat-pusat Studi di Madura	Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan; Pengembangan prodi umum (non keislaman) serta pascasarjana untuk menuju ke UIN	a. Bertambahnya jumlah prodi umum b. Ketimpangan peminat prodi keislaman dan prodi umum di daerah yg berbeda	a. Jumlah prodi umum di Madura b. Jumlah peminat prodi

9	Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Lingkungan hidup (pantai dan pegunungan); Abrasi dan sampah serta hutan bakau	<p>a. Banyaknya abrasi serta kurangnya pengolahan sampah di sekitar pantai Branta Pesisir Pamekasan</p> <p>b. Adanya reklaması (baik ilegal maupun legal) di beberapa daerah pesisir</p>	Daerah-daerah yang memiliki pantai seperti Waru, Batu Marmar, Tlanakan, dan Pademawu.
10	Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura	Merawat dan mengembangkan Bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, media penyampaian ilmu dan pesan keagamaan	<p>c. Pembelajaran bahasa daerah maksimal hanya pada tingkat SMP</p> <p>d. Pengaruh media sosial dan elektronik.</p> <p>e. Pendidikan (keteladanan) orang tua tentang bahasa daerah dalam keluarga terbilang menurun dari generasi ke generasi dan diganti dengan bahasa nasional dan atau bahasa asing</p> <p>f. Meningkatkan penggunaan Bahasa Madura dalam tradisi tulis populer (baliho, pengumuman, dll) yang tidak diimbangi dengan sosialisasi penulisan ejaan yang benar</p>	<p>a. Jumlah sekolah yang memiliki mata pelajaran/ kurikulum di Bahasa Madura</p> <p>b. Jumlah kampus di Madura yang memiliki prodi Pendidikan dan atau Sastra Bahasa Madura</p>
11	Persoalan Sosial Keagamaan dan Ekonomi (Keluarga) Migran	Legalitas tenaga migran	<p>a. Banyaknya persyaratan dan sulitnya proses untuk mendapatkan legalitas sebagai pekerja migran.</p> <p>b. Keberadaan <i>cukong/tekong</i> yang merekrut warga Madura untuk menjadi TKI</p>	Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Pamekasan

	<p>c. Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yg bagus tidak diiringi dengan <i>skill</i> memadai dan minim pengetahuan ttg legalitas, sehingga banyak yang nekat berangkat.</p> <p>d. Pekerjaan yang digelar di tanah rantau bukan merupakan tipikal <i>high-skill</i> dan tidak bisa dilanjutkan sepulangnya ke Madura.</p>			
12	<p>a. Belum adanya model serta desain integrasi keilmuan yang praktis</p> <p>b. Adanya tumpang tindih yg tidak jelas antara bidang keilmuan</p>	<p>Model dan desain integrasi keilmuan; Keilmuan, keislaman, dan ke-Madura-an</p>	<p>Pengembangan (Lembaga) Pendidikan dan Pusat-pusat Studi di Madura</p>	
13	<p>a. Menemukan relevansi dari kategorisasi kemiskinan dalam konteks Madura.</p> <p>b. Melacak akar persoalan kemiskinan di Madura, pemicu awal dan penyebab angka kemiskinan susah ditekan.</p>	<p>Kajian kemiskinan Madura; Kategorisasi kemiskinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat 	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Jumlah penduduk miskin di Pamekasan adalah 122,43 ribu pada-----</p>

pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

- Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh asyarakat.
- Kemiskinan kultural merupakan jenis

kemiskinan yang disebabkan faktor budaya, seperti malas tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, boros, dan lain-lain.

- Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakatnya tidak memungkinkan mereka ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia.

14	Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Pengembangan potensi wisata Madura; Wisata alam (pantai dan pegunungan) serta wisata religiyus	<p>a. Pengelolaan serta manajemen potensi wisata belum maksimal dan kurang memberikan kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah)</p> <p>b. Sektor wisata lebih banyak digarap oleh pihak swasta/perorangan</p>	<p>a. Jumlah tempat wisata (Makam Ronggosukowati, Pantai Jumiang, Pesarean Batu Ampar, Museum Mandi Laras, Api tak Kunjung Padam)</p> <p>b. Jumlah PAD dari sektor wisata</p>
15	Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura	Pernikahan dini dan anak jalanan	<p>a. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini</p> <p>b. Peran Pengadilan Agama, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam mencegah (atau melanggengkan) tradisi pernikahan dini</p> <p>c. Kondisi anak jalanan dan peran Dinas Sosial/Satpol PP</p>	<p>a. Jumlah kasus pernikahan dini</p> <p>b. Jumlah anak jalanan</p> <p>c. Tindak lanjut/program Dinsos terhadap anak jalanan</p>

2. Peta Pengabdian Masyarakat

No	Topik	Sasaran dan Model Pengabdian	Deskripsi Kualitatif	Deskripsi Kuantitatif
1	<p>Persoalan sosial-keagamaan (keluarga) pekerja migran</p>	<p>Sasaran: Dampak sosial yang dialami anak pekerja migran Model: <i>Service Learning</i>, metode belajar yang menghubungkan materi dan teori yang didapat di ruang kelas untuk diaplikasikan menjadi tindakan nyata berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Pendidikan keagamaan anak keluarga pekerja migran perlu mendapat penanganan secara khusus</p>	<p>Jumlah pekerja migran yang ada di Jatim adalah 2.093 pada -----. Angka di Pamekasan harus cek di Dinas Ketenagakerjaan</p>
2	<p>Dinamika sosial-politik-budaya di Madura; Problem narkoba dan kenakalan remaja</p>	<p>Sasaran: Kasus narkoba dan kenakalan remaja di daerah Pantura Pamekasan Model: ABCD (<i>Asset-Based Community Development</i>); paradigma dengan prinsip pendekatan yang mengarah pada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan ketiganya secara mandiri dan maksimal.</p>	<p>Faktor-faktor: kenakalan remaja dan narkoba di daerah Pantura</p>	<p>Jumlah kasus narkoba dan kenakalan remaja yang terjadi; Cek ke BNN, BANAAR NU, Satreskrim Polda, dan atau Dinsos</p>

<p>3</p>	<p>Persoalan sosial keagamaan (keluarga) pekerja migran ; Persoalan <i>single parent</i> dalam keluarga pekerja migran</p>	<p>Sasaran: Dampak yang ditimbulkan dari pola pengasuhan anak pekerja migran. Model: <i>Service Learning</i>, metode belajar yang menghubungkan materi dan teori yang didapat di ruang kelas untuk diaplikasikan menjadi tindakan nyata berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Pola pengasuhan anak pada keluarga <i>single parent</i> pekerja migran tidak terelakkan perlu mendapat perhatian secara serius dan terpola dengan sistematis</p>	<p>a. Jumlah pekerja migran yang ada di Pamekasan b. Jumlah kasus perceraian pada pekerja migran</p>
<p>4</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Kajian tentang tembakau dan kesejahteraan petani Madura</p>	<p>Sasaran: Belum adanya <i>policy</i> yang berpihak pada kesejahteraan petani Metode: CBR (<i>Community Based Research</i>), model yang memberi ruang bagi penyatuan antara teori dan praktik, merefleksikan teori melalui praktik dan menerapkan praktik melalui teori. CBR juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kerjasama antara komunitas</p>	<p>a. Belum ada penentuan standar (minimal dan maksimal) harga tembakau oleh pemerintah b. Belum ada <i>policy</i> yang berpihak pada komunitas petani tembakau</p>	<p>a. Pemerintah Kabupaten (Pemekab) telah menetapkan target produksi tembakau tahun ini (2021), yakni 16.458 ton. Angka tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 24 ribu ton. b. Menurut Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan</p>

dan akademisi sehingga setiap individu dalam masyarakat mendapatkan kesempatan secara kolektif untuk terlibat dalam peningkatan taraf hidup mereka sendiri.

Perkebunan (Distan PHP) Pamekasan, Ahmad Suaidi, penurunan tersebut terbilang signifikan. Sementara itu, target lahan tanam tembakau tahun ini juga berkurang menjadi 23.511 hektare dari awalnya 29.875 hektare di 2019.

c. Jumlah petani tembakau di Pamekasan

d. Pemkab belum menetapkan *break-even point* (BEP) tembakau untuk tahun ini. Pada 2019 lalu, BEP-nya adalah Rp 42.600 per kilogram. Sayangnya, mayoritas pabrik membeli tembakau di bawah ketentuan harga tersebut.

5	<p>Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura; Pendirian dan atau pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, pusat studi halal, pusat studi ziswak</p>	<p>Sasaran: Pusat studi pesantren, pusat studi wakaf, dan lembaga-lembaga ziswak yang belum didirikan dan atau belum tersertifikasi. Metode: ABCD (<i>Asset-Based Community Development</i>); paradigma dengan prinsip pendekatan yang mengarah pada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan ketiganya secara mandiri dan maksimal.</p>	<p>a. Mayoritas pendidikan anak Madura dimulai di pesantren. Jika tidak, maka akan dianggap tabu. b. Pondok pesantren merupakan icon masyarakat Madura c. Inisiatif soal pusat studi wakaf dikarenakan luasnya tanah dan banyaknya persoalan tentang waqaf di Madura d. Pamekasan sebagai pusat pemerintahan (keresidenan) e. Sebagian pusat studi yg ada, terutama yang diinisiasi oleh pemerintah, tidak dapat menjalankan program sebagaimana mestinya. Sementara itu, pusat studi yg diinisiasi lembaga swadaya masyarakat distigma oleh masyarakat sendiri.</p>	<p>Jumlah pesantren yang ada di Pamekasan kurang lebih 231</p>
6	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Manajemen sampah pada</p>	<p>Sasaran: Sampah yang dihasilkan pondok pesantren, utamanya yang jumlah santrinya besar, relatif belum tertangani secara maksimal.</p>	<p>a. Belum ada teknologi pengelolaan sampah yang baik dan efektif</p>	<p>a. Ada sekitar 231 pesantren di seantero Pamekasan</p>

<p>lembaga pesantren dan masyarakat</p>	<p>Metode: PAR (<i>Participatory Action Research</i>); jenis penelitian berbasis perubahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh warga masyarakat dalam suatu komunitas arus bawah. Semangatnya adalah untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif dan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik).</p>	<p>b. Kreativitas pengelolaan dan pengolahan sampah masih minim, sehingga hampir semua sampah tidak didaur ulang karena dianggap tdk profitabel</p>	<p>b. Jumlah santri di pesantren-pesantren 'besar'.</p>
<p>7</p> <p>Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura; Pemekaran dan atau penambahan prodi menuju transformasi kelembagaan</p>	<p>Sasaran: Pengembangan prodi umum dan program pascasarjana menuju UIN Madura. Metode: ABCD (<i>Asset-Based Community Development</i>); paradigma dengan prinsip pendekatan yang mengarah pada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan ketiganya secara mandiri dan maksimal.</p>	<p>a. Kebutuhan lembaga untuk tujuan transformasi/ pengembangan menjadi UIN b. Tidak lengkapnya sarana dan prasarana c. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>a. Jumlah Prodi umum di Perguruan Tinggi Madura b. Jumlah peminat prodi tersebut</p>

<p>8</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Wilayah pesisir.</p>	<p>Sasaran: Abrasi, sampah, dan hutan bakau. Metode: PAR (<i>Participatory Action Research</i>); jenis penelitian berbasis perubahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh warga masyarakat dalam suatu komunitas arus bawah. Semangatnya adalah untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif dan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik).</p>	<p>a. Adanya kasus abrasi pantai b. Kurangnya pengelolaan sampah di sekitar pantai c. Pelestarian hutan bakau belum bersifat partisipatif d. Tiadanya sinkronisasi pengelolaan wisata pegunungan dengan pelestarian lingkungan hidup di wilayah setempat e. Ketidaktahuan tentang ekologi dan profitabilitas bakau</p>	<p>Jumlah wilayah/desa pesisir dan wilayah pegunungan</p>
<p>9</p>	<p>Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura; Merawat dan mengembangkan Bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, instrument ilmu,</p>	<p>Sasaran: Bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, media penyampai ilmu dan pesan keagamaan. Metode: <i>Service Learning</i>, metode belajar yang menghubungkan materi dan teori yang didapat di ruang kelas untuk diaplikasikan</p>	<p>a. Pembelajaran bahasa daerah, jika ada, hanya berhenti pada tingkat SMP b. Inferioritas dan mental <i>inlander</i> penutur bahasa daerah di hadapan kesemarakan bahasa nasional dan asing</p>	<p>a. Jumlah sekolah yang memiliki kurikulum/mengajarkan Mata Pelajaran Bahasa Madura b. Jumlah kampus yang memiliki prodi Bahasa Madura</p>

		<p>menjadi tindakan nyata berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>		
<p>10</p>	<p>Persoalan sosial keagamaan (keluarga) pekerja migran ; Legalitas tenaga migran</p>	<p>Sasaran: Legalitas pekerja migran. Metode: <i>Service Learning</i>, metode belajar yang menghubungkan materi dan teori yang didapat di ruang kelas untuk diaplikasikan menjadi tindakan nyata berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Sulitnya persyaratan dan lamanya waktu mendapatkan legalitas sebagai pekerja migran</p>	<p>Jumlah TKI di Pamekasan dari tahun ke tahun; 1,784 (2014), 1,852 (2015) 1,553 (2016)</p>
<p>11</p>	<p>Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura; Model dan desain integrasi keilmuan.</p>	<p>Sasaran: Keilmuan, keislaman, dan ke-Madura-an. Metode: <i>Service Learning</i>, metode belajar yang menghubungkan materi dan teori yang didapat di ruang kelas untuk diaplikasikan menjadi tindakan nyata berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>a. Belum adanya model serta desain integrasi keilmuan secara praktis b. Sedikitnya ilmuwan yang menguasai lintas bidang keilmuan</p>	<p>Contoh-contoh model kurikulum yang integratif interkoneksi</p>

<p>12</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Kajian kemiskinan Madura</p>	<p>Sasaran: Tipologi kemiskinan yang relevan dengan konteks Madura. Metode: PAR (<i>Participatory Action Research</i>); jenis penelitian berbasis perubahan yang yang dilaksanakan secara partisipatif oleh warga masyarakat dalam suatu komunitas arus bawah. Semangatnya adalah untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif dan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik).</p>	<p>a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. b. Kategori kemiskinan tersebut direfleksikan dengan konteks ke-Madura-an</p>	<p>a. Penduduk miskin di Pamekasan pada 2019 adalah sebesar 13,95 persen. Sedangkan 2020 lalu, persentase tersebut menjadi 14,60 persen. b. Tingkat pengangguran terbuka di Pamekasan pada 2019 adalah sebesar 2,32 persen. Pada 2020, angka tersebut meningkat menjadi 3,49 persen. c. Mereka yang pengangguran tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.</p>
<p>13</p>	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Pengembangan potensi wisata Madura</p>	<p>Sasaran: • Wisata alam (pantai dan pegunungan) • Wisata religiyus Metode: ABCD (<i>Asset-Based Community Development</i>);</p>	<p>a. Pengelolaan serta manajemen potensi wisata belum maksimal sehingga kurang memberikan kontribusi pada PAD b. Masih minimnya jiwa dan keterampilan</p>	<p>a. Jumlah tempat wisata b. Jumlah PAD dari sektor wisata</p>

14	Dinamika Sosial Politik Budaya di Madura; Problem pernikahan dini dan anak jalanan.	<p>paradigma dengan prinsip pendekatan yang mengarah pada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan ketiganya secara mandiri dan maksimal.</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan dini • Anak jalanan <p>Metode: <i>Service Learning</i>, metode belajar yang menghubungkan materi dan teori yang didapat di ruang kelas untuk diaplikasikan menjadi tindakan nyata berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p><i>entrepreneurship</i></p> <p>c. Iklim bahari cenderung tidak disukai wisatawan lokal dan domestik.</p>	<p>a. Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Pamekasan, Rofi'ah, meski dalam aturan yang berlaku, syarat usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, banyak yang mengajukan dispensasi untuk mendapatkan surat nikah, meskipun belum cukup umur untuk menikah.</p> <p>b. Ada 87 pengajuan dispensasi nikah (di bawah umur) yang dikabulkan. Rata-rata yang mengajukan adalah perempuan.</p>
			<p>a. Pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi dan kehidupan masyarakat Madura</p> <p>b. Pernikahan dini tak terpisahkan dari kehidupan perekonomian masyarakat Madura</p> <p>c. Anak jalanan tak terpisahkan dari kesenjangan ekonomi serta kehidupan rumah tangga masyarakat Madura</p>	

C. Kabupaten Sumenep

Secara geografis, Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten paling timur di Pulau Madura. Kabupaten Sumenep bisa diidentifikasi menjadi dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093, 46 KM² dengan 54,75 % wilayah berada di daratan (1.146,93 KM²) dan 45,21% wilayah berada di kepulauan (946,53 KM²).

Kabupaten Sumenep terdiri dari dua puluh tujuh (27) kecamatan. Delapan (8) kecamatan di antaranya merupakan kecamatan yang berada di wilayah kepulauan. Dari dua puluh tujuh kecamatan yang mencakup daratan dan kepulauan, terdapat tiga ratus tiga puluh (330) desa dan 4 kelurahan. Dari 334 desa dan kelurahan tersebut, 71 di antaranya adalah desa kepulauan. 27 kecamatan yang terdiri dari 330 desa dan 4 kelurahan tersebut dihuni oleh 1.124.436 jiwa dengan perimbangan jumlah laki-laki sebesar 542.735 jiwa dan perempuan berjumlah 581.701.

Secara geografis, Kabupaten Sumenep terletak di antara 113^o 32' - 116^o 16' Bujur Timur dan 4^o 55' - 7^o 24' Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Selat Madura di bagian selatan, Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pamekasan di sebelah Barat, dan Laut Jawa serta Laut Flores di sebelah Timur.

Dibandingkan dengan kabupaten lain di pulau Madura, Sumenep merupakan kabupaten dengan potensi ekonomi yang melimpah, utamanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang bisa digali di Kabupaten Sumenep mencakup mineral, mineral dan air tanah. Kabupaten Sumenep memiliki kandungan mineral yang beragam, misalnya jenis bahan galian mineral dan batuan yang terdiri dari pospat, batu gamping, batu bintang (calsit), pasir kwarsa

(gypsum), batu lempung, dan kaolin. Posfat ini tersebar di sejumlah kecamatan di Sumenep seperti Batang-batang, Pasongsongan, Dasuk, Ambunten, Batu Putih, Gapura, Manding, Bluto, Guluk-guluk, Lenteng, Ganding, Sumenep, dan Arjasa. Sementara itu, batu gamping bisa ditemukan di Kecamatan Pasongsongan, Dasuk, Gapura, Batang-batang, Batu Putih, Lenteng, Ganding, dan Sumenep sedang batu bintang tersebar di Kecamatan Batu Putih dan Pasongsongan. Gypsum, di sisi lain, terdapat di Kecamatan Batu Putih dan Rubaru, pasir kwarsa di Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Dasuk, dan Batang-batang, dolomit di Bluto dan Batu putih, serta kaolin di sekitar gunung Mandala.

Selain kandungan mineral, Sumenep juga memiliki aset migas yang cukup besar. Sumber migas terbesar berada di Pagerungan yang oleh pemerintah dipercayakan kepada PT. Energy Mega Persada (EMP) Kangan Limited dan PT. Santos Oil. Selain di Pagerungan, migas juga ditemukan di Blok Kangean. Ditemukan ada 14 sumur produktif, 7 sumur di darat dan 7 sumur lagi di lepas pantai. Di luar aset sumber daya alam, Sumenep juga memiliki potensi ekonomi lainnya baik dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan ekonomi kreatif. Keragaman potensi ekonomi ini didasarkan pada karakter wilayah Sumenep yang relatif beragam dari wilayah daratan hingga kepulauan.

Pada wilayah daratan, ada keragaman potensi ekonomi antaran dataran rendah dan perbukitan. Potensi ekonomi wilayah dataran rendah yang bersambung dengan bibir pantai di antaranya adalah perikanan dan tambak. Tambak umumnya ditemukan pada pertanian garam seperti di Kalianget, Saronggi, Gapura, Pragaan, Giligenting, Talango, Bluto, dan Dungkek. Sementara itu, wilayah daratan yang jauh dari pantai memiliki potensi ekonomi

pertanian seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu atau ketela pohon, dan sebagainya. Di luar beberapa jenis komoditas tersebut, tembakau merupakan salah satu potensi ekonomi yang paling diandalkan masyarakat Sumenep, meskipun pada 10 tahun terakhir, potensi ekonomi yang dihasilkan oleh petani tembakau tidak seperti pada 20-30 tahunan yang lalu.

Sebagai bagian dari Pulau Madura, Kabupaten Sumenep bisa diidentifikasi sebagai kota santri. Setidaknya, ada 388 pesantren tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep. Dari 388 jumlah pesantren tersebut, hanya sedikit di antaranya yang mengurus izin operasional sehingga hanya sebagian kecil saja yang teridentifikasi dalam data Kementerian Agama. Data yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Pesantren Kementerian Agama menyebutkan bahwa jumlah pesantren di Kabupaten Sumenep adalah 177 pesantren. Angka ini menempatkan Sumenep di urutan ke-3 setelah Sampang (352) dan Pamekasan (218) dalam kategori jumlah pesantren terbanyak di Madura. Perbedaan data jumlah pesantren yang disampaikan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan Dikpontren Kemenag RI ini bisa jadi didasarkan pada ada tidaknya izin operasional masing-masing pesantren tersebut dari Kementerian Agama RI.

Meskipun demikian, jumlah pesantren yang relatif banyak tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sumenep, bahkan Madura secara keseluruhan, memiliki minat yang besar dalam pengembangan pendidikan berbasis pesantren. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pendidikan pesantren adalah alternatif sistem pendidikan yang menjadi primadona bagi masyarakat Sumenep. Secara umum, meski pesantren yang berada di Sumenep memiliki kekhasan masing-masing, ada dua model sistem *mainstream*

yang bisa dipetakan. *Pertama* adalah sistem pesantren murni yang hanya menfokuskan pada pengkajian kitab kuning dan *kedua* adalah sistem pesantren yang mengintegrasikan sistem pertama dengan model klasikal dan berjenjang dengan memadukan kelimuan kitab kuning dengan sekuler (non-kitab kuning). Dalam wujud yang lebih sederhana, langgar juga memiliki peran yang nyaris sama dengan pendidikan pesantren. Langgar bahkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk membekali anak-anaknya dengan pengetahuan dasar keislaman sebelum dididik di pesantren. Institusi langgar menjadi semacam institusi “antara” sebelum anak didik mengenyam pendidikan di pesantren.

Selain pesantren dan langgar, institusi pendidikan lain yang menjamur di Sumenep adalah sekolah atau madrasah yang terpisah dari pendidikan pesantren. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa institusi pendidikan formal di Sumenep dari level pendidikan dasar hingga atas terdiri dari 650 SD dan 560 MI; 191 SMP dan 335 MTS; 191 SMA dan 335 MA; dan 66 SMK. Institusi pendidikan ini ada yang terintegrasi dengan pendidikan pesantren dan ada juga yang terpisah sama sekali. Pendidikan formal-klasikal-berjenjang yang terpisah dengan institusi pendidikan pesantren biasanya mendasarkan kurikulum pada Kemendikbud atau Kemenag.

Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan agama dalam lembaga-lembaga sekuler dengan lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan pesantren, opsi alternatif dari institusi pendidikan di Sumenep adalah Madrasah Diniyah. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Sumenep pada 2016 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Kebijakan Wajib Diniyah. Perda ini memberikan kekuatan hukum penyelenggaraan

Madrasah Diniyah guna mengisi keterbatasan ruang pembelajaran agama di sekolah-sekolah sekuler. Ini juga didasarkan pada kesadaran bahwa pendidikan agama memiliki peran penting dalam penguatan pendidikan karakter yang menjadi nilai lebih dari pendidikan pesantren.

1. Peta Riset Sosial Keagamaan

No	Topik	Fokus Topik	Dekripsi Kualitatif	Deskripsi Kuantitatif	Jenis
1	Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata; Pantai dan Pegunungan.	Tambah dan Alih Fungsi Lahan di Pantai Sumenep	<p>a. Lemahnya kontrol pemerintah dalam perizinan alih fungsi lahan</p> <p>b. Pola oligarki dalam eksploitasi lahan dan dampak terhadap ekosistem laut. Padahal, Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor Kep. 28/Men/2004 tentang pedoman budidaya udang di tambah mengatur larangan tambah yang merusak lingkungan dan alam.</p> <p>c. UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>d. Dampak terhadap situs wisata alam</p>	Lahan produktif di Sumenep menyusut 5 % /tahun (data 2017)	Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan
2	Dinamika Sosial Politik Budaya di Madura	Pernikahan Dini	<p>a. Kekhawatiran orang tua bahwa putrinya akan tidak "laku" sehingga segera dimikahkan meski masih di bawah umur.</p>	<p>a. Dalam rentang waktu Januari-April 2021, ada 533 pengajuan nikah</p>	Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan

3	<p>Persoalan Sosial Keagamaan (Keluarga) Pekerja Migran</p>	<p>Model Toleransi dan Interaksi Masyarakat Madura Perantauan di Kalimantan</p>	<p>b. Pernikahan dini sebagai pelarian dari keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. c. <i>Mark-up</i> usia pengantin untuk mendapatkan legalitas pernikahan</p>	<p>b. Pada 2020, pernikahan di bawah umur mencapai 2.029 kasus. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.723 lebih.</p>	<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>
4	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p>	<p>Manajemen Sampah pada Lembaga dan Masyarakat ; Pengelolaan Sampah di Pesantren</p>	<p>d. Pesantren sebagai penyumbang sampah terbesar e. Kebijakan pesantren mereduksi sampah f. Model dan pola pengelolaan sampah di pesantren</p>		<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>
5	<p>Pesantren, Tradisi dan</p>	<p>Korporasi Pesantren; Kemandirian Pesantren</p>	<p>a. Pesantren sebagai lembaga dari, oleh, dan untuk masyarakat</p>		<p>Riset Verstehen</p>

<p>Religiusitas Masyarakat Madura</p>	<p>dan Kesadaran <i>Entrepreneur</i></p>	<p>b. Fenomena baru ketergantungan pesantren pada pemerintah c. Spirit kemandirian pesantren dan kesadaran <i>entrepreneur</i></p>	<p>dan Riset Aksi Perubahan</p>
<p>6</p>	<p>Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura</p>	<p>Lembaga Tradisional Keagamaan Madura (Langgar, Pesantren Salaf, Madrasah Diniyah); Kebertahanan Madrasah Diniyah</p>	<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>
<p>7</p>	<p>Pesantren, Tradisi dan</p>	<p>a. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Kebijakan Wajib Diniyah (Sumenep Kota) b. Persaingan antar lembaga Madrasah Diniyah (Pedesaan) c. Kesejahteraan guru diniyah rendah d. Mencari pola kebertahanan madrasah diniyah e. Nilai penting institusi pendidikan langgar f. Langgar sebagai benih awal pesantren g. Kesadaran orang tua untuk menitipkan anaknya ke kiai langgar minim meski pentingnya pendidikan langgar bukan tak disadari</p>	<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>
	<p>Bahasa Madura sebagai Bahasa Ilmu</p>	<p>Pesantren sebagai salah satu institusi utama perawatan Bahasa</p>	<p>Riset Verstehen</p>

	<p>Religiusitas Masyarakat Madura</p>	<p>Pengetahuan</p>	<p>Madura justru mengalami krisis dalam penggunaan Bahasa Madura sebagai bahasa (pengantar) ilmu</p>	<p>dan Riset Aksi Perubahan</p>
<p>8</p>	<p>Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura</p>	<p>Naskah Kuno Pesantren</p>	<p>h. Melimpahnya naskah kuno di pesantren yang belum diungkap dan diteliti i. Naskah kuno dan memori kolektif nilai keislaman dan kemaduraan</p>	<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>
<p>9</p>	<p>Persoalan Sosial Keagamaan (Keluarga) Pekerja Migran</p>	<p>Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura perantaraan; Visi Moderasi dan Nilai Kemaduraan sebagai Bekal Perantau Madura</p>	<p>j. Modal keagamaan manusia Madura k. Nilai-nilai yang dimiliki manusia Madura</p>	<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>
<p>10</p>	<p>Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura</p>	<p>Perubahan Peran Publik Perempuan Madura ; Agensi Perempuan Santri</p>	<p>l. Pada mulanya, perempuan hanya menjalankan perpanjangan peran laki-laki m. Pergeseran peran perempuan Madura n. Perempuan madura sebagai agen</p>	<p>Riset Verstehen dan Riset Aksi Perubahan</p>

2. Peta Pengabdian Masyarakat

No	Kluster dan Topik	Model Pengabdian	Deskripsi Kualitatif	Deskripsi Kuantitatif
1	<p>Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata</p> <p>Lingkungan Hidup (Pantai, Pegunungan); Tambak dan Alih Fungsi Lahan</p>	<p>Asset Based Community-driven Development</p>	<p>a. Lemahnya kontrol pemerintah dalam perizinan alih fungsi lahan</p> <p>b. Pola oligarki dalam eksploitasi lahan dan dampak terhadap rusaknya ekosistem laut.</p> <p>c. Padahal, Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor Kep. 28/Men/2004 tentang pedoman budidaya udang di tambak mengatur larangan tambak yang merusak lingkungan dan alam.</p> <p>d. UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>e. Dampak terhadap situs wisata alam</p>	<p>Lahan produktif di Sumenep menyusut 5 % /tahun (data 2017)</p>
2	<p>Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura</p> <p>Pernikahan Dini;</p> <p>Pendampingan Anak Usia Menikah</p>	<p>Asset Based Community-driven Development</p>	<p>a. Kekhawatiran orang tua bahwa putrinya akan tidak “laku” sehingga segera dinikahkan meski masih di bawah umur.</p> <p>b. Pernikahan dini sebagai pelarian dari keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.</p>	<p>a. Dalam rentang waktu Januari-April 2021, ada 533 pengajuan nikah</p>

<p>b. Pada 2020, pernikahan di bawah umur mencapai 2.029 kasus. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.723 lebih.</p>	<p>c. Mark-up usia pengantin untuk mendapatkan legalitas pernikahan</p>			
	<p>a. Masih tingginya spirit merantau orang Madura b. Dua kategori perantau Madura: Temprorer dan permanen (Kuntowijoyo) c. Pola interaksi sosial dan potensi konflik</p>		<p>3 Persoalan Sosial Keagamaan (Keluarga) Pekerja Migran Model Toleransi Masyarakat Madura Perantauan; Interaksi sosial masyarakat Madura di Kalimantan</p>	
	<p>a. Pesantren sebagai penyumbang sampah terbesar b. Kebijakan pesantren mereduksi sampah c. Model dan pola pengelolaan sampah di pesantren</p>	<p>CBPR</p>	<p>4 Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pariwisata Manajemen Sampah pada Lembaga dan Masyarakat; Pengelolaan Sampah di Pesantren</p>	

5	<p>Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura</p> <p>Korporasi Pesantren; Model Kemandirian dan <i>Entrepreneurship</i></p>	ABCD	<p>a. Pesantren sebagai lembaga dari, oleh, dan untuk masyarakat</p> <p>b. Fenomena baru ketergantungan pesantren pada pemerintah</p> <p>c. Spirit kemandirian ermasala dan kesadaran <i>entrepreneur</i></p>	<p>Ada 1.346 Madin yang memiliki Ijop di Sumenep dengan 21.778 siswa dan 6.512 guru.</p>
6	<p>Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura</p> <p>Lembaga Tradisional Keagamaan Madura (Langgar, Pesantren Salaf, Madrasah Diniyah); Model Kebertahanan Madrasah Diniyah dan Langgar</p>	ABCD	<p>a. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Kebijakan Wajib Diniyah (Sumenep Kota)</p> <p>b. Persaingan antar lembaga Madrasah Diniyah pedesaan</p> <p>c. Mencari pola kebertahanan Madrasah Diniyah</p>	
7	<p>Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura</p> <p>Merawat dan</p>	ABCD	<p>a. Nilai penting institusi pendidikan langgar</p> <p>b. Kesadaran orang tua untuk menitipkan anaknya ke kiai langgar semakin minim meski pentingnya pendidikan langgar bukan tak disadari</p>	<p>Pesantren sebagai institusi perawatan Bahasa Madura justru mengalami krisis karena berkurangnya penggunaan Bahasa Madura sebagai bahasa (pengantar) ilmu.</p>
		<i>Service Learning</i>		

	<p>Mengembangkan Bahasa Madura sebagai Bahasa Tutur, Tulis, Ilmu, dan Keagamaan Model ; Pengembangan Bahasa Madura sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan</p>	Service Learning	<p>Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura. Naskah Kuno Pesantren dan Keraton; Model Naskah Kuno Pesantren</p>	8
	<p>a. Melimpahnya naskah kuno di pesantren yang belum diungkap dan diteliti b. Naskah kuno dan memori kolektif nilai keislaman dan kemaduraan</p>	ABCD	<p>Persoalan Sosial Keagamaan (Keluarga) Pekerja Migran Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Perantaraan</p>	9
	<p>a. Modal keagamaan manusia Madura b. Nilai-nilai yang dimiliki manusia Madura</p> <p>a. Pada mulanya, perempuan hanya menjalani hanya perpanjangan peran laki-laki b. Pergeseran peran perempuan Madura c. Perempuan Madura sebagai agen</p>	Agensi Perempuan Santri	<p>Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura Perubahan Peran Publik Perempuan Madura</p>	10

BAB V **Penutup**

A. Kesimpulan

RISET SOSIAL-KEAGAMAAN Madura merupakan distingsi bagi IAIN Madura sehingga sangat penting untuk dipetakan melalui sebuah *riset group* sebagai sebuah kebijakan penelitian yang berbasis kebutuhan dan kepentingan lembaga ke depan dan *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Pengabdian masyarakat bidang sosial-keagamaan Madura pun merupakan distingsi bagi IAIN Madura sehingga amat penting dipetakan juga dengan menggunakan model partisipatoris. Dalam waktu lima tahun ke depan agenda riset dan pengabdian masyarakat Sosial-Keagamaan Madura akan mewujudkan menjadi topik riset dan pengabdian masyarakat yang *branded* bagi IAIN Madura dan *stakeholder* terkait.

B. Rekomendasi

1. Kerjasama penelitian dengan *stakeholder* dan lembaga terkait
2. Integrasi interkoneksi keilmuan, keislaman, dan kemaduraan
3. Jumlah topik peta riset sosial keagamaan di kabupaten Pamekasan sebanyak 15 topik
4. Jumlah topik peta pengabdian masyarakat di kabupaten Pamekasan sebanyak 14 topik
5. Jumlah topik peta riset sosial keagamaan di kabupaten Sampang sebanyak 12 topik
6. Jumlah topik peta pengabdian masyarakat di kabupaten Sampang sebanyak 12 topik
7. Jumlah topik peta riset sosial keagamaan di kabupaten Sumenep sebanyak 10 topik
8. Jumlah topik peta pengabdian masyarakat di kabupaten Sumenep sebanyak 10 topik

BIODATA TIM RISET



Mohammad Kosim. Lahir di Sampang pada 1969. Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan H. Badarudin (alm) dan Hj. Hasanah (alm) ini menempuh pendidikan formal di sejumlah tempat, yaitu SDN 1 Tambelangan Sampang (1976-1982), SMPN 2 Sampang (1982-1985), SMAN 1 Sampang (1985-1988), Program Sarjana IAIN Sunan Ampel Cabang Pamekasan pada Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI (1988-1992), Program Magister IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1997-1999), dan Program Doktor IAIN Sunan Ampel (sekarang UIN Sunan Ampel) Surabaya (2005-2009). Ia juga pernah mengenyam pendidikan non-formal di Pondok Pesantren al-Haramain Duwa' Pote Sampang (1982-1988) dan Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Bagandan Pamekasan (1988-1992).

Selama berkuliah di Program Sarjana, ia menjadi aktivis PMII dan pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Pamekasan (1990-1991). Sejak 1994 ia diangkat menjadi PNS di kampus tersebut (sekarang IAIN Madura) sebagai dosen tetap Fakultas Tarbiyah. Di almamaternya tersebut, ia pernah menjabat Pembantu Ketua Bidang Akademik (2000-2004), Direktur Pascasarjana (2013-2016); Ketua (2016-2018), hingga Rektor (2018-2022). Ia juga pernah menjadi konsultan DMAP (*Development Madrasah Aliyah's Project*) 2000-2001 dan *assessor* sertifikasi guru PAI (2009-2015). Ia pernah mengikuti *short course* selama satu bulan di National University of Singapore (2010). Sejumlah artikelnya dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, terutama terkait pendidikan Islam.



Moh. Mashur Abadi, lahir di Lamongan, 25 April, 1965. Pendidikan dasarnya ditempuh di Lamongan (selesai pada 1977), pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) di Bangil, Pasuruan (selesai pada 1982), dan pendidikan tingginya di IAIN Surabaya (sarjana muda pada 1985, sarjana lengkap pada 1989, dan magister pada 2007). Saat ini menjabat ketua LP2M IAIN Madura dan tinggal di Prenduan, Pragaan, Sumenep. Menyukai keindahan ilmu dan hikmah yang mewujud dalam peradaban yg santun, maju, dan bermartabat.



Nor Hasan dilahirkan di Pamekasan, 13 Agustus 1967, dari pasangan Syafaat dan Saimah. Menamatkan pendidikan dasar di SDN Larangan Tokol pada 1980, MTs Negeri Parteker pada 1984, dan PGAN Pamekasan pada 1987. Pendidikan sarjana hingga doktoralnya ditempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya (S1 di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, lulus pada 1991 serta S2 dan S3 pada konsentrasi Dirosah Islam lulus masing-masing pada 2000 dan 2013). Sejak 1994 menjadi dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Pamekasan, cabang IAIN Sunan Ampel yang kini bermetamorfosis menjadi IAIN Madura. Mata Kuliah yang diampunya adalah Metodologi Studi Islam, Sejarah Peradaban Islam, serta Islam dan Budaya Madura.

Laki-laki berpangkat Lektor Kepala (IV/c) ini dipercaya sebagai Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan pada dua periode berturut-turut sejak 2000 sampai 2008 kemudian Wakil Ketua/Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga periode 2016-2018 dan 2018-2022. Karya tulis-karya tulis terbarunya berjudul “Symbolic Function & Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding,” “Dhammong: A Rain Ritual in Madura (A Study on Its History, Function, and History Symbolic Meaning)”, “The Social Construction of Islamic Education Through the Internalization of Traditional Values and Regional Culture” (EEO, 19 (3)) serta “Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong di Madura.” (Jakad Media Publishing: Surabaya 2021).



Moh. Zahid lahir di Sumenep, 5 Desember 1971. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan H. Moh. Hasyim (alm.) dan Hj. Salma ini menyelesaikan S1 dan S2-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan S3 ditempuh di UIN Sunan Kaliga Yogyakarta. Karir sebagai PNS dimulai sejak 1997 dan saat ini diamanahi sebagai Wakil Rektor II IAIN Madura. Di luar kampus, ia juga aktif sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Pusat Pelayanan Terpadu Komisi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam, LPTQ, Dewan Pengawas Syariah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Dhuafa, Ketua Tim Penerjemah Al-Qur'an dalam Bahasa Madura, dan berbagai aktifitas lainnya.

Karya-karya terbarunya adalah “Keabsahan Pengangkatan *Wāli Muhakkam* di Madura Berdasarkan Fikih Syāfi’i” (2012), “Perlakuan Elit Muslim terhadap Al-Qur’an (Analisis Uses and Gratification Theory)” (2014), “Komunikasi Santun dalam Al-Qur’an, (2014), “Implikasi Perdebatan Keberadaan Basmalah terhadap Kemutawatiran Alquran” (2015), “Harmonisasi Ayat-ayat Naskh dalam Kompilasi Al-Suyūthī dan Implikasinya terhadap Istinbāth Hukum” (2016), “*The Existence of Wasathiyah Islam In Madura (An Analysis of Urban Society’s Acceptance of Islamic Content on Social Media)*” (2018), “PEMAKNAAN HUKUM JAHILIYYAH (Studi Pandangan Pakar Muslim terhadap Nilai-Nilai Keindonesiaan dalam Perumusan Hukum Islam)” (2020), dan “Ragam *Fawatih As-Suwar* Inventarisasi Ulama Salaf dan Perspektif Baru” (2020).



Ainur Rahman Hidayat lahir di Pamekasan pada 1972. Sejak 1992 mulai mempelajari filsafat, 2005 memperoleh gelar master di bidang filsafat, dan 2012 memperoleh gelar doktor di bidang filsafat. Semuanya ia tempuh di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.

Sejak 2002-2020 aktif menulis di berbagai tempat: Pada 2003 menulis “Refleksi Metafisik Carok dalam

Budaya Madura” di Jurnal Filsafat UGM. 2006 menulis “Bahasa dan Hegemoni Kekuasaan” di Jurnal Karsa IAIN Madura. 2014 menulis “Ontologi Relasi Zakat Profesi” di Media Syari’ah UIN Ar-Raniry Aceh. 2016 menulis “Pemberdayaan Pengolahan Air Kelapa Secara Partisipatif, Gapura Sumenep” pada Proceedings of The International Conference UIN Surabaya. 2018 menulis “Farmer Group Strengthening Strategy Through Development Model of An-Nur Mosque Empowerment Post (Posdaya)” di Proceedings of The International Conference UIN Malang.

Sejak 2009-sekarang aktif berkontribusi di struktur ortaker IAIN Madura sebagai Sekretaris P3M STAIN Pamekasan, Ketua P3M STAIN Pamekasan, Kepala Laboratorium Syariah STAIN Pamekasan, dan Ketua Pusat Penelitian IAIN Madura.



Ah. Fawaid lahir di Sumenep, 12 September 1978. Setelah *nyantri* di PP. Annuqayah Guluk-Guluk, ia melanjutkan studi S1 dan S2 di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk melengkapi riset tesisnya, ia berkunjung ke Mesir atas biaya IIEF. Pada 2014, ia melakukan kunjungan kedua ke negara yang sama dalam program ARFI yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Sementara S3 diselesaikan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Semua jenjang pendidikan yang ditekuni berfokus pada Kajian Islam, khususnya Kajian Al-Qur’an dan Tafsir.

Di samping menerjemah dan menyunting buku, ia menulis di sejumlah jurnal, di antaranya: “Pemikiran Mufasir Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan” (Karsa, 2015); “Paradigma Sufistik Tafsir Al-Qur’an Bediuzzaman Said Nursi dan Fethullah Gulen” (Suhuf, 2015); “*Maqâshid al-Qur’ân* dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut *Thahâ Jâbir al-‘Alwânî*” (Madania, 2017); “Yaman Pasca Al-Rabî Al-Arabî: “Musim Semi Gerakan Islamisme” dan “Negara Gagal” (Istiqro’, 2017); “Qadimisme versus Jadidisme dan Dinamika Ulama di Asia Tengah” (Islamica, 2017); dan “*Vernacular Tafsir in Madura: Negotiating Idea of Human Equality in the Social Hierarchical Tradition*” (co-

author) (Australian Journal of Islamic Studies, 2021). Kini, selain mengajar di Madrasah Diniyah Nurul Islam dan Madrasah Diniyah Annuqayah Latee, ia menjadi dosen di Program Studi IQT, IAIN Madura.



Moch Cholid Wardi adalah Dosen Ushul Fiqh dan peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Madura. Berasal dari Kembang Kuning, Lancar, Larangan, Pamekasan, dan menempuh pendidikan dasar di desa tersebut. Mengenyam pendidikan menengah dan atas di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo sejak 1995 sampai 2001. Pendidikan Strata 1 dan Strata 2 diselesaikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2007.

Ia aktif meneliti sejak 2008 sampai sekarang pada bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial. Di antara penelitian yang dilakukan adalah: “Internalisasi Konsep Masalah melalui Buku Saku dalam Menguatkan Karakter Islam Siswa” (2017), “Hak Menunaikan Ibadah bagi Buruh di Kota Gerbang Salam dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan” (2018), “Kesejahteraan Material-Spiritual Buruh di Pamekasan; Studi Undang-undang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah” (2019), “Kontekstualisasi *al Maqashid al Kulliyat* pada Aspek Individu, Keluarga, Umat dan Kemanusiaan; Studi terhadap Pemikiran Jamaluddin Athiyah” (2020), dan “Model Penanggulangan Dampak Narkoba pada Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Madura” (2021). Saat ini ia juga aktif sebagai pengelola Yayasan Kiai Mudrikah Kembang Kuning dan menjadi pengurus pada Badan Komunikasi Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD Kabupaten Pamekasan.



Zaglul Fitrihan lahir di Sabang, Aceh, pada 21 Agustus 1980. Selesai “nyantri” di Pondok Pesantren Tgk. Chiek Oemar Diyan Aceh (1998), melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan memperoleh gelar Lc. (*licentiate*) pada 2002. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Islam Oumdurman Khartoum Sudan (2012) dan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaxya (2020) dengan

jurusan yang sama.

Sempat mengajar di UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala Aceh pada 2012. Setelah menikah dengan gadis Madura pada 2013, mengajar di IAI Nazhatut Thullab Sampang dan kini menjadi dosen PNS di IAIN Madura sejak 2015.

Menulis tentang Pembacaan Al-Qur’an dalam Perspektif Mohammed Arkoun (Jurnal Islamuna Vol. 3 No. 1 Juni 2016), Pendekatan *Ijbārī* dalam Studi Al-Qur’an (Jurnal Kabilah Vol. 2 No. 2 Desember 2017) dan “*al-Qiyām al-Ijtimā’iyyah fī al-Qur’ān; Fikrah Sayyid Quṭb al-Ijtimā’iyyah fī Kitābih Fī Zilāl al-Qur’ān*” (Proceeding of International Scientific Meeting of Arabic Language UIN Ar-Raniry 2018).



Syukron Affani dilahirkan di Pamekasan pada 06 Desember 1980. Alumni P.P. Annuqayah Latee Guluk-guluk, Madrasah Muallimin Muallimat P.P. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, dan Ma’had Ali PP. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Pendidikan S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sejak 2015 menjadi dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, tepatnya di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Di situ, ia menjadi pengelola Jurnal al-Ihkam dan anggota tim *Penerjemahan al-Quran ke dalam Bahasa*

Madura kerjasama IAIN Madura-Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Balitbang Kemenag RI 2017.

Ia menulis buku, *book chapter* dan artikel jurnal. Beberapa di antaranya adalah buku “Islam Transformatif: Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Progresif” (terbitan Logung Pustaka Yogyakarta pada 2009 yang ditulis bersama H.M. Su’ud Lc. M.S.I.); artikel “Tantangan Penerapan HAM bagi Masyarakat Muslim (Kebebasan Beragama Dan Posisi Perempuan)” dalam buku kompilasi *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Pusat HAM (PUSHAM) UII Jogjakarta – Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Oslo University Norwegia 2012); buku *Tafsir al-Quran dalam Sejarah Perkembangannya* (Prenadamedia: Jakarta, 2019), “Scientific Qur’anic Exegesis in Indonesia; Contributions by Scholars, Institutions, and the Government *The Australian Journal of Islamic Studies* Vol 6 No 4 (2021).



Masyithah Mardhatillah, anak sulung dari tiga bersaudara, lahir di Sumenep, 17 Juni 1989. Menghabiskan masa sekolah dasar di SDN Daleman I, Ganding, Sumenep, lalu bergeser ke Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dan Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2007). Sejak 2007 hijrah ke Yogyakarta untuk belajar di Jurusan Tafsir dan Hadist, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (lulus 2011) kemudian Konsentrasi Studi Qur’an dan Hadist di Program Pascasarjana pada kampus yang sama (lulus 2014).

Di luar kampus, ia sempat bekerja serabutan sebagai peneliti di ISAs (*Institute of Southeast Asian Studies*), penerjemah dan penyunting di Pustaka Pelajar dan Mizan Pustaka Utama serta beberapa perusahaan SEO daring. Sejak 2015 *boyong* ke Madura lalu menjadi dosen di IAIN Madura tiga tahun kemudian. Menjadi pengelola jurnal *Al-Ihkam*, *Revelatia* dan *Perdikan* serta sesekali menulis di media cetak, media daring, hingga buku antologi. *Concern* terhadap kajian tafsir, gender, dan Madura.



Taufik Kurrahman, lahir di Sumenep, 6 Mei 1988, di Desa Talang Saronggi Sumenep, dari pasangan Riyum dan Sahrum. Pria yang biasa disapa Upik ini menamatkan pendidikan dasar di SDN Talang II Saronggi pada 2000 lalu melanjutkan pendidikan menengah ke Pondok Pesantren Attaufiqiyah Bluto yang diselesaikannya pada 2006. Jenjang Sarjana diselesaikan pada 2011 di IAINJ Paiton Probolinggo dengan program studi *Ahwalus Syakhshiyah*. Demi mengejar pendidikan tinggi, sejak 2012 ia melanjutkan strata II di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam prodi Ilmu Hukum dan lulus pada 2014. Tak puas di situ, mulai 2020, ia melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas 17 Agustus 1945 dalam program Ilmu Hukum.

Setelah diterima sebagai ASN, sejak 2015, ia bekerja di STAIN Pamekasan (IAIN Madura) hingga kini. Kampus tersebut mengantarkan dirinya terlibat dalam berbagai aktifitas mulai pengelola Jurnal (*Iqtishadia*, *Al-Ihkam* dan *Jurnal Nuansa*), hingga jabatannya kini sebagai sekretaris Satuan Pengawasan Internal sejak 2019. Beberapa karya terbarunya adalah: “Fungsi Partai Politik pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan Sistem Pemerintahan di Indonesia” (*Jurnal Civic UNY*, Vol 16 No 1 2019); “Kekuasaan Partai Politik dalam Sistem Politik Indonesia” (*Duta Media*, 2020); dan “Status Pekerjaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Penyebab Perceraian dalam Perkawinan” (*Jurnal Syakhshia*, UIN Banten, 2021).



Mohammad Subhan Zamzami dilahirkan di Pamekasan pada 1985. Ia mengenyam pendidikan formal dan informal di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Amien Prenduan, Sumenep, Markaz Dar al-Lughah wa Dirasat Islamiyah Palengaan, Pamekasan, dan Bustan 'Usyshaqil Qur'an Betengan, Demak. Ia menyelesaikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan S2-S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sejak 2014-sekarang, ia mengabdikan diri di IAIN Madura sebagai dosen S1 dan S2, editor *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, *managing editor Islamuna*:

Jurnal Studi Islam, *reviewer* Nuansa: NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam serta Revelatia: Jurnal Ilmu al-Qur`an and Tafsir. Di samping itu, ia menjadi sekretaris Senat Akademik dan admin Litapdimas serta Sippol untuk penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menulis beberapa artikel di media massa, media online, dan jurnal serta beberapa buku.



Faraniena Yunaeni Risdiana lahir pada 19 Februari 1992 di Surabaya. Sejak 2010 mulai mempelajari Matematika dan pada 2015 memperoleh gelar sarjana di Universitas Airlangga, Surabaya. Ia kemudian melanjutkan jenjang Magister pada Konsentrasi Statistika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Sejak 2019 aktif menulis di berbagai tempat. Tiga karya terbarunya adalah “Analisis Jaringan Kantor dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah Tahun 2020” (Jurnal J-Statistika Unipa Surabaya), “ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL NEGARA-NEGARA ASEAN DENGAN PENDEKATAN SIMULTAN SPASIAL MENGGUNAKAN GENERALIZED METHOD OF MOMENT (GMM)” (Variance Unpati Ambon, 2020), dan “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” (Jurnal Entita TIPS IAIN Madura)



Mohammad Erliyanto lahir di Pamekasan, 4 Agustus 1974, anak ketiga dari lima bersaudara buah hati Moh Wafa (alm.) dan Nasihah (alm). SD diselesaikan di SDN Barurambat Timur I, SMP diselesaikan di SMPN 5 Pamekasan, SMA diselesaikan di MAN I Pamekasan dan S1 diselesaikan di Universitas Madura (UNIRA). Karir sebagai PNS mulai 2000 sebagai staf perpustakaan, 2001 sampai 2004 sebagai staf akademik, 2005 sebagai staf bagian administrasi umum, 2006 sampai 2010 sebagai bendahara

pengeluaran, 2011 sampai 2018 di sebagai operator persediaan dan perlengkapan di administrasi umum lalu 2019 sampai saat ini sebagai arsiparis di LP2M IAIN Madura.

Selama menjadi PNS di STAIN Pamekasan hingga IAIN Madura, ia telah mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan di Balaidiklat Kementerian Agama Surabaya di antaranya: 1. Diklat Inventaris Kekayaan Negara (IKN), 2. Diklat BMN, 3. Diklat Tata Persurutan, dan 4. Diklat Perencanaan dan Diklat Kearsipan di Bogor.



Ahmad Fakhurraji lahir di Pamekasan, 11 Juli 1986, sebagai putra bungsu dari empat bersaudara buah hati pasangan H. Abd. Kadir (alm.) dan Hj. Saleha. Pendidikan formal diselesaikan di SDN Jungcangcang I pada 1998, SMPN I Pamekasan pada 2001, lalu SMAN 4 Pamekasan pada 2004. Pada 2008 memperoleh gelar S1 Akuntansi di Universitas Madura dan melanjutkan studi S2 bidang Akuntansi Forensik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura melalui

program *State Accountability Revitalization* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (STAR BPKP) pada 2016.

Awal 2009 mulai mengabdikan pada STAIN Pamekasan (saat ini IAIN Madura) di Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan. 2010–2016 diamanahi untuk mengelola keuangan dan anggaran kampus selain sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejak 2019 hingga saat ini menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda di Biro AUAK. Beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) formal yang pernah diikuti antara lain: Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (L4), Diklat Keuangan oleh Biro Keuangan Kementerian Agama RI, Diklat Perencanaan oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama RI, Pelatihan Audit Mutu Internal, dan Pelatihan Audit Investigasi oleh BPKP.



Samsul Arifin, lahir di Pamekasan, 01 November 1991; anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Sulihan dan Juma'atiah. SD diselesaikan di SDN Pademawu Timur IV, SMP diselesaikan di MTsN 1 Pademawu, SMA diselesaikan di SMAN I Pademawu dan S1 diselesaikan di Universitas Islam Madura (UIM). Karir sebagai pegawai dimulai sejak 2014 sebagai staf administrasi bagian akademik dan sejak 2015 sampai sekarang menjabat sebagai staf unit TIPD (Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) IAIN Madura.